Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

LAPORAN KINERJA

LKj

Pemerintah Kabupaten Bantul
Tahun 2015

Pemerintah Kabupaten Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2016

Pernyataan Telah Direviu

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2015

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2015 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Bantul.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Bantul, 24 Maret 2016

Inspektur Kabupaten Bantul

BAMBANG PURWADI NUGROHO, SH, MH

NIP. 19710506 199603 1 003

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Instansi Pemerintah se Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Bantul Tahun 2015 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2015.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2015 dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bantul yang Projotamansari Sejahtera, Demokratis dan Agamis.

Tahun 2015 bagi Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015. RPJMD tersebut sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul pun dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015.

Secara keseluruhan penyelenggaran pemerintahan tahun 2015 di Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil. Dari 18 (delapan belas) indikator kinerja utama terdapat 2 (dua) indikator yang berkriteria Tinggi, bahkan terdapat 13 (tiga belas) indikator yang memenuhi kriteria Sangat Tinggi. Kinerja yang tercermin dari capaian atas sejumlah *outcome* yang masuk kritertia Tinggi dan Sangat Tinggi tersebut, tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus dan berkelanjutan.

Namun kami sadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai sesuai target. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. Untuk itu laporan ini dapat sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan lebih akuntabel, meningkatkan pengawasan, tanggap, profesional, efisien dan efektif, transparan, melaksanakan kesetaraan, berwawasan ke depan, mendorong partisipasi warga dan menegakkan hukum baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, dan bimbingan dalam penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Bantul Tahun 2015, khususnya Pemerintah melalui Kementerian PAN dan RB serta Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bantul, 24 Maret 2016

Bupati Bantul,

Drs. SUHARSONO

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kabupaten Bantul tahun 2015 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul sejak tahun 2011 berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011–2015. Dalam perjalanan pembangunan jangka menengah yang pada tahun 2015 merupakan tahun terakhir. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan yang tahapan dan tatacaranya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 –

2015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan tahun 2015, disesuaikan dengan perubahan atas RPJMD. Dalam menetapkan IKU tersebut mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 18 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 13 (tiga belas) indikator atau sebanyak 77,22% berkriteria **Sangat Tinggi**, 2 (dua) indikator atau 11,11% berkategori **Tinggi,** 2 (dua) indikator atau 11,11% tercapai dengan kategori **Sedang** dan 1 (satu) indikator atau 5,56% tercapai dengan kategori **Rendah**. Beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum seperti yang diharapkan perlu mendapatkan perhatian pada tahun berikutnya.

Untuk 13 (tiga belas) IKU yang pencapaiannya masuk kriteria Sangat Tinggi, yaitu indikator yang pencapaiannya ≥ 90,1% meliputi:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
2. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
3. Opini pemeriksaan BPK
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
5. Persentase Gizi Buruk
6. Usia Harapan Hidup
7. Angka melek huruf
8. Rata-rata lama sekolah
9. Tingkat Ketersediaan Energi
10. Tingkat ketersediaan Protein
11. Persentase peningkatan jumlah wisatawan
12. Angka pengangguran
13. Persentase Desa Tangguh

Selanjutnya IKU yang mencapai lebih dari 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2015 sebanyak 11 (sebelas) IKU, mencakup :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
2. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4. Persentase Gizi Buruk
5. Usia Harapan Hidup
6. Angka Melek Huruf
7. Tingkat Ketersediaan Energi
8. Tingkat ketersediaan Protein
9. Persentase peningkatan jumlah wisatawan
10. Angka pengangguran
11. Persentase Desa Tangguh

IKU yang masuk kriteria **Tinggi** dari target yang ditetapkan yaitu Angka Kematian Bayi, terealisir 80,71% dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi terealisisr 86,73%. IKU yang masuk kriteria **Sedang** adalah IKU Angka Kematian Ibu terealisir 75%, Persentase jumlah penduduk miskin, yang terealisir 73,67% dari target yang ditetapkan. Sedangkan IKU yang masuk kriteria **Rendah** yaitu IKU Indeks Gini yang realisasinya mencapai 60,72% dari target yang ditetapkan. Tantangan utama yang dihadapi adalah perlunya upaya yang lebih serius untuk menjawab permasalahan kematian bayi, pertumbuhan ekonomi, kematian ibu, jumlah penduduk miskin dan pemerataan pendapatan.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan dari setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Bantul ke depan. Walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Selain permasalahan seperti tersebut diatas, Angka Melek Huruf dan rata-Rata Lama Sekolah masih perlu mendapatkan perhatian lebih. Peran Pemerintah Kabupaten Bantul diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan pendidikan. Peran pemerintah lainnya mencakup pentingnya perlindungan dan peningkatan inklusi sosial bagi warga miskin dan kelompok- kelompok marjinal lainnya yang masih menghadapi ketimpangan akses dan manfaat pembangunan.

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan berbagai unsur baik Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah DIY, daerah lain maupun juga dengan pihak-pihak di luar

pemerintah. Beberapa sasaran seperti meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan, meningkatnya kualitas pendidikan, menurunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin menunjukkan pentingnya kontribusi dan koordinasi dengan dunia usaha dan juga masyarakat. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja , hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh SKPD di lingkungan Kabupaten Bantul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang, utamanya dalam rangka memberikan peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu ____ iii
Kata Pengantar ____ v
Ikhtisar Eksekutif ____ vii
Daftar Isi ____ xi
Daftar Tabel ____ xv
Daftar Gambar ____ xviii
Bab I Pendahuluan ____ 1
A. Latar Belakang ____ 1
B. Gambaran Umum Demografi ____ 2
1. Jumlah Penduduk ____ 2
2. Indeks Pembangunan Manusia ____ 4
3. Penduduk Miskin ____ 4
C. Kondisi Ekonomi Daerah ____ 5
D. Keragaman SDM Pemerintah Kabupaten Bantul ____ 6
E. Isu Strategis ____ 8
Bab II Perencanaan Kinerja ____ 13
A. Rencana Strategis ____ 13

1. Visi dan Misi 13
2. Tujuan dan Sasaran 14
3. Tema Pembangunan dan Program Prioritas 21

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 23

C. Program untuk Pencapaian Sasaran 24

Bab III Akuntabilitas Kinerja 27

A. Capaian Kinerja Organisasi 28

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 30

1. Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah dan Desa serta Lembaga Pemerintah Daerah 30
2. Sasaran Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 37
3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 40
4. Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 43
5. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan 55
6. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemerataan Pendapatan 60
7. Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah 66
8. Sasaran Meningkatnya Jumlah Pengunjung Objek Wisata 69
9. Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran 73
10. Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin 77
11. Sasaran Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana 82

C. Pencapaian Kinerja Lainnya 86

1. Pencapaian Target MDGs 86
2. Status Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 87
3. Pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) 88

D. Akuntabilitas Anggaran 89

E. Efisiensi Sumber Daya 94

Bab IV Penutup 97

Lampiran I Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Bantul Tahun 2015 99

Lampiran II Struktur Pemerintah Kabupaten Bantul _____ 101

Lampiran III Nilai Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bantul Tahun 2014 – 2015 (Jutaan Rupiah) _____ 102

Lampiran IV Target dan Capaian MDGs di Bantul Tahun2011 – 2015 _____ 103

Daftar Tabel

Tabel I.1	Perkembangan Indeks Komponen IPM Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015	4
Tabel I.2	Perkembangan PDRB Per Kapita (Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2010) Tahun 2012-2015	5
Tabel II.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	20
Tabel II.2	Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015	21
Tabel II.3	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015	23
Tabel II.4	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2015	24
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	28
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015	28
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah dan Desa serta Lembaga Pemerintah Daerah	30
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	38
Tabel III.5	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2012 – 2015	38
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	41
Tabel III.7	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	43
Tabel III.8	Jumlah Dokter Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015	50

Tabel III.9 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 51
Tabel III.10 Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Tahun 2015 52
Tabel III.11 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan 55
Tabel III.12 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemerataan Pendapatan 60
Tabel III.13 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah 66
Tabel III.14 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Jumlah Pengunjung Objek Wisata 69
Tabel III.15 Objek Wisata Kabupaten Bantul Tahun 2011 - 2015 69
Tabel III.16 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata Tahun 2011 – 2015 71
Tabel III.17 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran 73
Tabel III.18 Angkatan Kerja Tahun 2015 74
Tabel III.19 Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 74
Tabel III.20 Jumlah Penganggur Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 75
Tabel III.21 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin 77
Tabel III.22 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana 82
Tabel III.23 Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Bantul 83
Tabel III.24 Frekuesi Kejadian Bencana di Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 84
Tabel III.25 Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Indeks Komponen IPM Kabupaten Bantul Tahun 2013-2015 87
Tabel III.26 Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015* 89
Tabel III.27 Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 90
Tabel III.28 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2015 90
Tabel III.29 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 92

Tabel III.30 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 94

Daftar Gambar

Gambar I.1 Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2015 ..3

Gambar I.2 Kepadatan Penduduk Geografis Kabupaten Bantul Tahun 2015 3

Gambar I.3 *Trend* Persentase Penduduk Miskin Tahun 2011 – 2015 4

Gambar I.4 Produksi Mie Lethek Khas Bantul 5

Gambar I.5 Pergeseran Struktur Ekonomi Tahun 2011 – 2015.....6

Gambar I.6 PNS Menurut Pendidikan 7

Gambar I.7 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin.....7

Gambar I.8 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural Tahun 2015 8

Gambar I.9 Sholat Berjamaah ke Masjid 9

Gambar I.10 Penari Barongsai 10

Gambar I.11 Peluncuran Program 35.000 MW oleh Presiden Jokowi 12

Gambar II.1 Program-Program Prioritas Beserta Korelasinya Terhadap Misi Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 22

Gambar III.1 Pencapaian IKU Bupati Tahun 2015 29

Gambar III.2 Penjabat Bupati Bantul, Bapak Drs. Sigit Sapto Raharjo, MM dalam Penerimaan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 31

Gambar III.3 Struktur Sebaran Infrastruktur Jaringan Internet dan Intranet.....34

Gambar III.4 LPSE Kabupaten Bantul 34

Gambar III.5 Tampilan Halaman Depan Esakip Bantul.....35

Gambar III.6 WTP tahun ketiga bagi Bantul 39
Gambar III.7 Perkembangan IKM Tahun 2011-2015 41
Gambar III.8 Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Ir. Fenty Yusdayati, MT bersama Sekretaris Daerah, Drs. Riyantono, M.Si menerima Tim Audit Badan Sertifikasi NQA Indonesia 42
Gambar III.9 *Trend* AKI Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 44
Gambar III.10 Kepala Dinas Kesehatan, drg. Maya Sintowati Pandji, MM bersama Asisten Administrasi Umum, Sunarto, SH., MM menerima Tim Verifikasi Manggala Karya Bakti Husada 45
Gambar III.11 *Trend* Angka Kematian Bayi Tahun 2011 – 2015 45
Gambar III.12 Kematian Bayi berdasarkan Penyebab Kematian 46
Gambar III.13 Trend Gizi Buruk Tahun 2011 – 2015 47
Gambar III.14 Kasus Gizi Buruk Tahun 2015 47
Gambar III.15 Perkembangan Umur Harapan Hidup Tahun 2011 - 2015 48
Gambar III.15 Mbah Ponikem Pembatik Tulis dari Imogiri Bantul 49
Gambar III.17 UHH Kabupaten/Kota di Wilayah DIY Tahun 2013 – 2015 49
Gambar III.18 Penyuluhan Kesehatan Jiwa oleh Dokter Psikiatri 50
Gambar III.19 Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Banguntapan III, Bantul 52
Gambar III.20 Perawatan Kolaborasi Ibu Hamil Beresiko (Wakol Buhares) di Puskesmas Kasihan I Bantul 54
Gambar III.21 *Trend* Angka Melek Huruf Tahun 2011 - 2015 56
Gambar III.22 Angka Melek Huruf Penduduk Kabupaten/Kota di Wilayah DIY Tahun 2011 – 2013 56
Gambar III.23 Membaca di Taman Bacaan Masyarakat 57
Gambar III.24 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2011-2015 58
Gambar III.25 Orkestra SMKN 2 Kasihan Bantul 58
Gambar III.26 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota se DIY Tahun 2013 – 2015 59
Gambar III.27 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2011 – 2015 61
Gambar III.28 Peranan Sektor Ekonomi Penyusun PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2015 62
Gambar III.29 Perkembangan Indeks Gini Tahun 2011 – 2015 63

Gambar III.30 Aktifitas membatik di Giriloyo, Imogiri, Bantul 64
Gambar III.31 *Trend* Keluarga Sejahtera Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2014 ... 65
Gambar III.32 Peluncuran mi kering "SRIOCA", produk dari Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) 67
Gambar III.33 Pelestarian Budaya Jawa 70
Gambar III.34 Gumuk Pasir Pantai Parangkusumo 71
Gambar III.35 Panembahan Senopati 72
Gambar III.36 Kegiatan Pelatihan 75
Gambar III.36 Perkembangan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2012 - 2016 76
Gambar III.38 *Trend* Persentase Penduduk Miskin Tahun 2011 – 2015 versi Pemerintah Kabupaten Bantul 78
Gambar III.39 *Trend* Persentase Penduduk Miskin Tahun 2011 – 2015 versi Pemerintah Pusat 78
Gambar III.40 Perkembangan Jumlah Jiwa Miskin Tahun 2011 -2014 79
Gambar III.41 Persentase Jiwa Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2014 79
Gambar III.42 Aktivitas Masyarakat 80
Gambar III.43 Rumah Syahrini, Bojong RT.03, Wonolelo, hasil relokasi korban longsor 83
Gambar III.44 Perkembangan IPM Tahun 2011 – 2015 87
Gambar III.45 IPM Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2015 88

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bab I Pendahuluan berisi :

A. *Latar Belakang*
B. *Gambaran Umum Demografi*
C. *Kondisi Ekonomi Daerah*
D. *Keragaman SDM Pemerintah Kabupaten Bantul*
E. *Isu Strategis*

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, profesional, efisien dan efektif, transparan, pelaksanaan kesetaraan, berwawasan ke depan, mendorong partisipasi warga dan penegakan hukum, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Kabupaten Bantul disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam lampiran lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Bupati menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. Gambaran Umum Demografi

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2015 menurut BPS sebanyak 919.440 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 460.075 jiwa atau sebanyak 50,04% dan perempuan sebanyak 459.365 jiwa atau sebanyak 49,96%. Kecamatan Banguntapan merupakan kecamatan yang berpenduduk terbanyak, yaitu 107.318 jiwa atau sebesar 11,67%, sedangkan jumlah penduduk Kecamatan Srandakan paling sedikit, yaitu 31.301 jiwa atau sebesar 3,4%.

Guna melakukan kebijakan yang berprespektif *gender* maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya. Dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif. Penduduk berdasarkan jenis kelamin per kecamatan sebagai berikut :

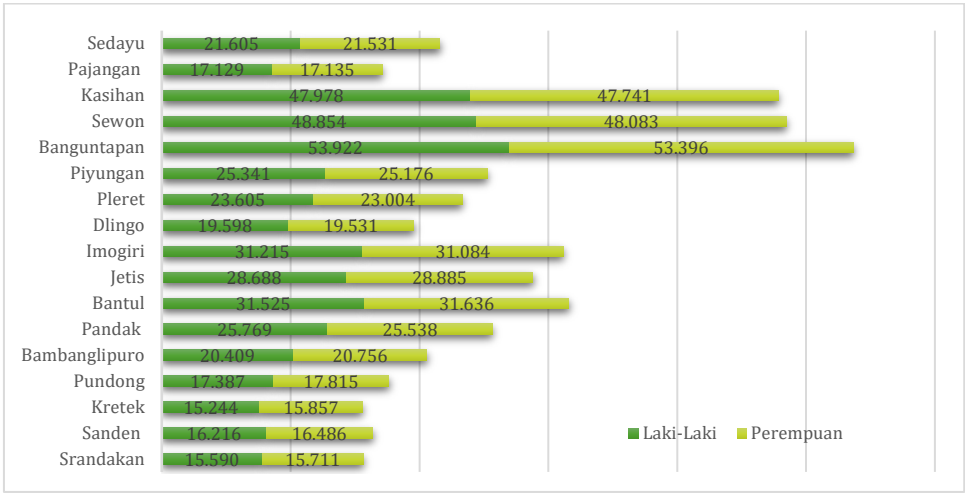

Sumber : Dinas Dukcapil, 2016

Gambar I.1 Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2015

Kepadatan penduduk dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain kepadatan penduduk geografis, kepadatan penduduk agraris, kepadatan penduduk daerah terbangun, kepadatan penduduk kelompok umur, dan sebagainya. Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu, kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah.

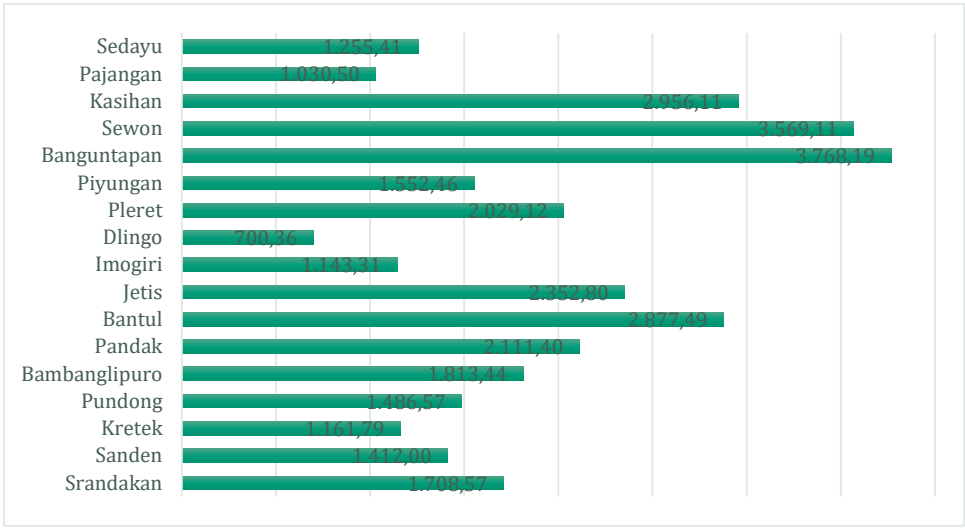

Sumber : Dinas Dukcapil, 2016

Gambar I.2 Kepadatan Penduduk Geografis Kabupaten Bantul Tahun 2015

2. Indeks Pembangunan Manusia

Selama lima tahun terakhir, nilai IPM Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang positif yaitu nilai IPM yang terus mengalami peningkatan yakni sebesar 75,31 pada tahun 2011 hingga 77,11 pada tahun 2015. Dalam kurun lima tahun terakhir, nilai IPM Kabupaten Bantul naik sebesar 1,8 poin sedangkan dalam setahun terakhir meningkat sebesar 0,33 poin. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul tahun 2015 lebih tinggi dari DIY (76,81) dan Nasional (69,50)

Tabel I.1 Perkembangan Indeks Komponen IPM Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015

Indeks	Nilai				
	2011	2012	2013	2014	2015
Angka harapan hidup (tahun)	73,14	73,13	73,19	73,22	73,24
Angka harapan lama sekolah (tahun)	13,55	13,95	14,15	14,355	14,62
Rata-rata lama sekolah (tahun)	8,34	8,35	8,44	8,72	8,74
Pengeluaran per kapita disesuaikan (ribuan)	13.725	13.778	13.789	13.902	13.921
IPM	75,31	75,79	76,13	76,78	77,11

Sumber : BPS, 2016

3. Penduduk Miskin

Dengan menggunakan dasar penghitungan sementara proyeksi dari BPS maka diperoleh persentase tingkat kemiskinan tahun 2015 sebesar 15,16%, lebih rendah dari tahun 2014 yaitu sebesar 15,69%.

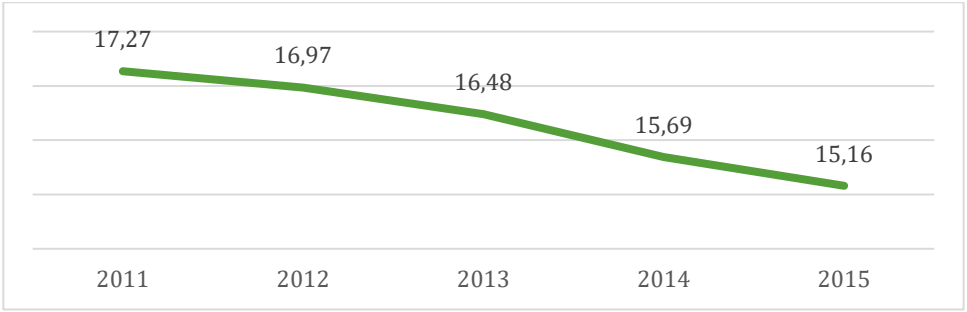

Sumber : BPS, 2016

Gambar I.3 *Trend* Persentase Penduduk Miskin Tahun 2011 – 2015

C. Kondisi Ekonomi Daerah

Peningkatan nilai tambah dari suatu proses kegiatan ekonomi menunjukkan adanya perkembangan perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukan makin berkembangnya aktifitas perekonomian baik aktifitas produksi, konsumsi, investasi maupun perdagangan di daerah tersebut yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan pada *System of National Account* (SNA) tahun 2008, pada tahun 2015 penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010 menggantikan tahun dasar 2000.

Tabel I.2 Perkembangan PDRB Per Kapita
(Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2010) Tahun 2012-2015

No.	Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan tahun 2010	
		Nilai (Rp)	Pertumbuhan	Nilai (Rp)	Pertumbuhan
1	2012	15,53	6,43	13.407.021,80	5,33
2	2013	17,04	9,76	14.138.719,30	5,46
3	2014	18,74	9,96	14.867.408,80	5,15
4	2015**)	19,75	5,39	15.625.110,04**	5,10**

Sumber : BPS, 2016

PDRB per kapita ADHK Kabupaten Bantul pada tahun 2015 mencapai 15,62 juta rupiah meningkat 14,20% dari capaian tahun 2012 sebesar 13,4 juta rupiah. Kondisi tersebut menunjukkan produktivitas perekonomian masyarakat semakin membaik.

Gambar I.4 Produksi Mie Lethek Khas Bantul

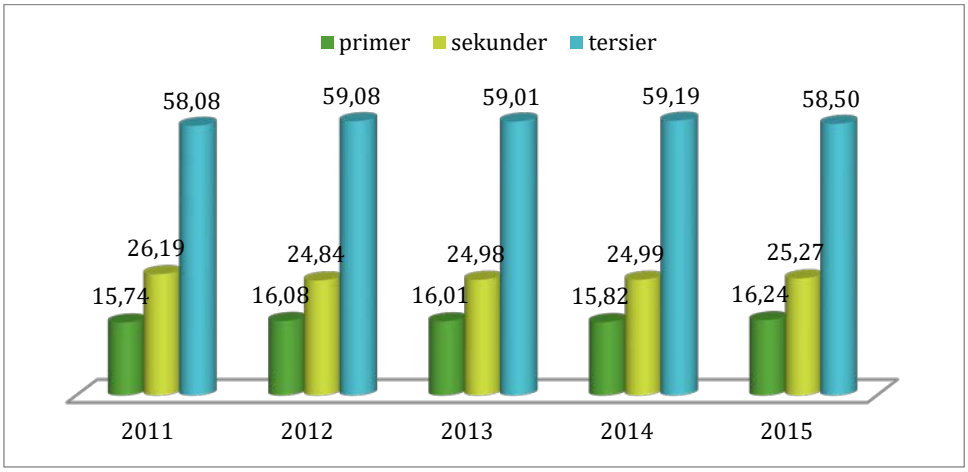

Sumber : Bappeda, 2016 (data diolah)

Gambar I.5 Pergeseran Struktur Ekonomi Tahun 2011 – 2015

Peran sektor primer sudah mengalami pergeseran ke arah sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor primer mempunyai peranan sebesar 16,24% lebih kecil dibandingkan dengan *share* sektor sekunder yang memberikan kontribusi sebesar 25,27% dan sektor tersier sebesar 58,50%.

D. Keragaman SDM Pemerintah Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM/PNS se Bantul per 31 Desember 2015 sebanyak 11.244 orang, terdiri dari 5.109 orang atau 45,44% Laki-laki dan 6.135 orang atau 54,56% Perempuan, hal ini menunjukkan bahwa perimbangan gender yang baik.

Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Bantul didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 52,10% atau 5.858 orang, disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 20,35% atau 2.288 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Bantul cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

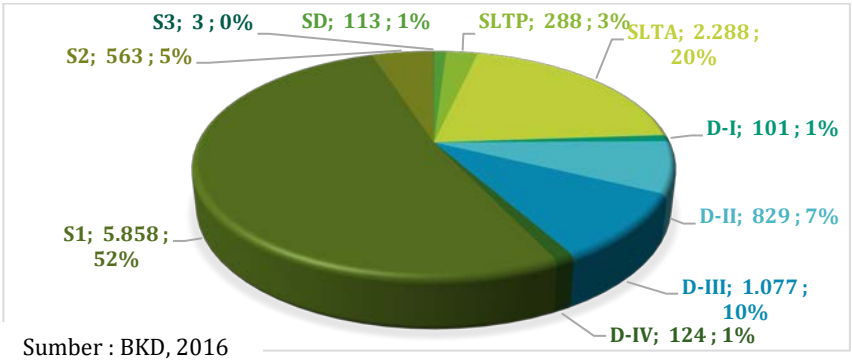

Sumber : BKD, 2016

Gambar I.6 PNS Menurut Pendidikan

Bila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya menunjukkan perimbangan gender yang baik. Pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mulai dari D1 hingga S1, perimbangan gender nya relatif berimbang. Kesenjangan dalam hal jumlah justru menguat pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah (SMA, SMP dan SD).

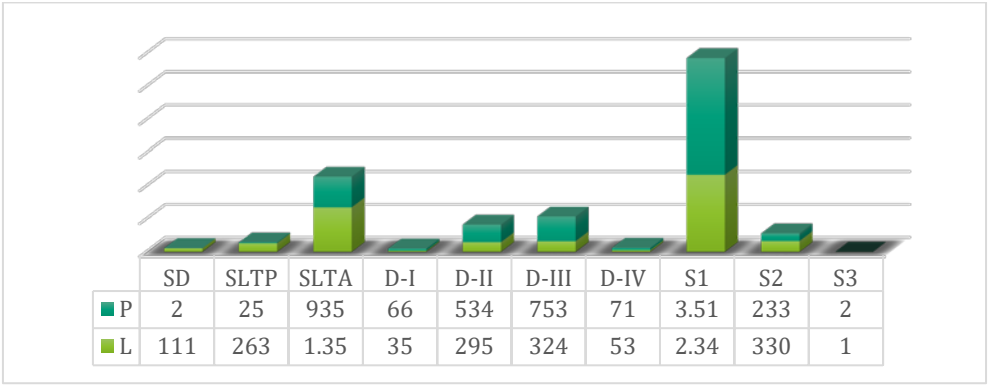

	SD	SLTP	SLTA	D-I	D-II	D-III	D-IV	S1	S2	S3
P	2	25	935	66	534	753	71	3.51	233	2
L	111	263	1.35	35	295	324	53	2.34	330	1

Sumber : BKD, 2015

Gambar I.7 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin

Sementara bila dipilah lagi menurut eselon, datanya menunjukkan bahwa semakin tinggi eselon, persentase perempuan semakin sedikit. Beberapa upaya perlu didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Apalagi karena melihat data sebelumnya, bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, kesenjangan gendernya justru semakin kecil.

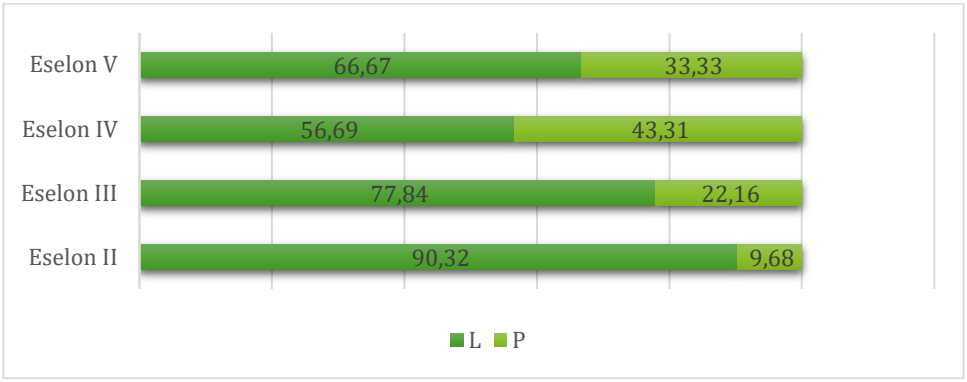

Sumber : BKD, 2016

Gambar I.8 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural Tahun 2015

E. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan bagi pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi
   Upaya untuk memperbaiki tata kepemerintahan dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban).

2. Tuntutan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
   Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut.

3. Kemiskinan
   Kemiskinan terjadi karena rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Bantul yang masih rendah di banding dengan rata-rata Daerah Istimewa Yogyakarta, sementara tingkat inflasi yang masih relatif tinggi sangat memungkinkan terjadinya penurunan terus menerus dalam daya beli masyarakat, sehingga menimbulkan beban berat bagi masyarakat miskin. Langkah preventif dalam bentuk pemberdayaan dan langkah kuratif dalam bentuk jaminan sosial atas kebutuhan dasar mesti dilakukan. Dan sisi lain, masih terjadinya kesenjangan antar wilayah kecamatan yang memerlukan strategi penanggulangan kemiskinan daerah.

4. Pengangguran

   Tingkat pengangguran terbuka yang terus meningkat selain disebabkan oleh dampak berkepanjangan krisis ekonomi dan bencana alam, juga disebabkan oleh rendahnya kualitas angkatan kerja yang tidak mampu bersaing dan tidak mampu menciptakan lapangan kerja mandiri. Peluang usaha pada prinsipnya masih lebar, dibutuhkan kemampuan dan fasilitasi untuk dapat merealisasikannya.

   Lapangan kerja yang akan terus bertahan adalah yang memiliki pangsa pasar yang besar dan memiliki daya saing produk, maka penerapan iptek dalam produksi dan bisnis serta peningkatan hubungan antara produsen lokal dengan pasar yang luas harus menjadi perhatian.

5. Pendidikan untuk kemajuan dan peningkatan moralitas

   Pendidikan memiliki dua mata pisau, di satu sisi berorientasi pada kecerdasan iptek guna kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan jasmaniah, dan di sisi lain berorientasi pada kecerdasan emosional dan spiritual guna kedamaian hidup, solidaritas dan kepedulian sosial.

Gambar I.9 Sholat Berjamaah ke Masjid

Penunjang sisi yang pertama adalah adanya kesempatan dalam memperoleh pendidikan, sarana dan prasarana yang memadai, serta tenaga kependidikan yang berkualitas. Kesempatan yang sama tersebut berlaku baik laki-laki-perempuan, tua-muda, kaya maupun miskin, yang artinya bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Bantul, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan gedung dan prasarana lainnya, merupakan contoh riil perhatian pemerintah terhadap pendidikan. Agar pendidikan bisa bermanfaat, kurikulum pendidikan juga

harus mempertimbangkan kebutuhan dunia usaha dan spesifikasi potensi setiap pelaku/siswa.

6. Pelayanan Kesehatan
   Sebagian target indikator kinerja SPM Kesehatan belum tercapai. Angka kematian bayi dan balita, status gizi masyarakat, endemi demam berdarah, flu burung dan chikungunya, angka kesakitan dan kematian diabetes militus, kardiovaskuler dan keganasan (kanker), kebiasaan merokok serta pola hidup tidak sehat lainnya menjadi sebagian dari masalah yang harus ditangani.
   Kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi, jaminan pelayanan kesehatan yang memuaskan bagi semua warga negara. Subsidi silang pun harus disadari oleh semua pengguna layanan kesehatan bahwa tanggung jawab pembangunan tidak hanya pada pemerintah, tetapi seluruh komponen masyarakat/swasta sesuai dengan kemampuannya.

7. Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
   Kesenian, tradisi, pariwisata, olahraga dan pemuda jika dapat berkembang dengan baik akan merupakan potensi yang dapat dieksploitasi profitabilitas maupun benefiditasnya.

Gambar I.10 Penari Barongsai

Evolusi budaya berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan pewarisan seni tradisi (transfer knowledge). Sebagai kebanggaan atas warisan leluhur, kecintaan terhadap tanah air (lokal genius), maka rantai yang hilang dalam setiap generasi pewarisan seharusnya diminimalisir. Daya tarik pariwisata terdapat pada sisi keunikan/kekhasan, keunggulan budaya, dan pelayanan dengan sarana dan fasilitas yang memadai. Daya dukung sektor ini juga

terdapat pada kepemudaan yang berkualitas, berprestasi, peduli, kreatif dan inovatif dalam mengambil setiap peluang/kesempatan positif yang ada.

8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB)

   Penggunaan lahan di Kabupaten Bantul setiap tahunnya selalu berubah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, aktifitas penduduk dan perluasan kegiatan perekonomian. Perubahan tata guna lahan berhubungan dengan lahan kering, serta berpedoman pada kebijakan pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul dinyatakan sebagai salah satu daerah penyangga pangan. Oleh karena berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB), di Bantul ditetapkan seluas 13.000 ha, sehingga dalam hal ini perlu disiapkan dukungan data dan tindak lanjut dalam bentuk perda kabupaten. Sisi lain, masalah pola tanam, irigasi, distribusi pupuk dan hama tanaman menjadi ancaman potensial untuk mempertahankan sawah lestari.

9. Perhatian terhadap investasi di sektor riil

   Belum mantapnya kondisi perekonomian daerah, ditandai dengan rendahnya dukungan investasi swasta bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi juga harus mempertimbangkan pemerataan pendapatan bagi masyarakat, artinya tidak boleh mengeksploitasi kekayaan/potensi masyarakat hanya untuk keuntungan sekelompok konglomerat. Contoh riil adalah merebaknya pasar modern yang tidak terkendali dikhawatirkan akan menggeser kelangsungan hidup pasar tradisional ataupun pertokoan/ warung masyarakat

10. Ancaman Kerusakan Lingkungan, Permukiman Tak Sehat, Bencana Alam dan Penanganan Pengungsi
    Menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kerusakan lingkungan hidup di kawasan penambangan bahan galian golongan C, dan menurunnya daya dukung lingkungan, kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya alam adalah sebagai akibat kurangnya pengendalian para pemangku-kepentingan (pemerintah, masyarakat maupun swasta) dalam pemanfaatan, dan penataan struktur ruang. Kesalahan dalam tata guna lahan, bangunan, rumah tidak layak huni, lingkungan pemukiman kumuh utamanya pada kawasan padat, penghijauan dan resapan air ke tanah serta penertiban perijinan perlu makin diperhatikan.

    Dampak dari kesalahan tersebut akan meningkatkan potensi kerusakan lingkungan dan bencana alam seperti kebakaran rumah, banjir karena luapan air selokan/air hujan, tanah longsor, kekeringan dan perubahan iklim global. Kondisi ini menuntut kesiap-siagaan, kecepatan waktu respon serta penanganan saat dan pasca bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

11. Visi Gubernur DIY menjadikan Pantai Selatan sebagai halaman muka DIY
    Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Gubernur DIY mempunyai Visi bahwa Pantai Selatan Sebagai Halaman Muka DIY, atau "Among Tani menjadi Dagang Layar", sehingga untuk mendukung dan menunjang visi tersebut perlu didukung dengan program/kegiatan di pantai selatan Bantul

12. Kabupaten Bantul dilalui jalur utama menuju Bandara Internasional dan Pembangunan Pabrik Baja di Kulonprogo
    Kabupaten Bantul yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kulon Progo, akan menerima dampak terhadap rencana pembangunan kedua proyek tersebut, baik dampak ekonomi dan pengembangan wilayah, sehingga perlu diantisipasi dengan menyiapkan program/kegiatan yang mendukung

Gambar I.11 Peluncuran Program 35.000 MW oleh Presiden Jokowi

13. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
    Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, pantai selatan merupakan kawasan untuk pengembangan energi baru terbarukan, yaitu energi angin, energi sinar matahari, dan energi gelombang. Di sepanjang pantai selatan Bantul akan dibangun PLTB dengan daya sebesar 50MW yang memanfaatkan tanah Sultan Ground (SG).

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Bab II Perencanaan Kinerja berisi :

A. *Rencana Strategis*
B. *Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2015*
C. *Program untuk Pencapaian Sasaran*

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul ditetapkan visi daerah yaitu :

"Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis dan Agamis"

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang adalah Bantul yang produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera dan demokratis diwarnai oleh nilai-nilai religius dan budi pekerti luhur yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaran

pemerintahan negara. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 adalah:

MISI 1 : Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik

MISI 2 : Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia,dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

MISI 3 : Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender

MISI 4: Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun mengacu visi dan misi serta didasarkan isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran,kebijakan,program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

PROJOTAMANSARI

Produktif dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya dapat berproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah.

Profesional dalam arti penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi agar mereka betul-betul matang dan ahli di bidangnya masing-masing. Tolok ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepada efisiensi penggunaan dana sarana, tenaga, serta waktu yang diperlukan.

Ijo royo-royo dalam arti tidak ada sejengkal tanahpun yang diterlantarkan sehingga baik dimusim hujan maupun dimusim kemarau dimanapun akan tampak suasana yang rindang. Dalam hal ini perlu diingatkan kepada masyarakat Bantul bahwa bagaimanapun Kabupaten Bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka mendukung tumbuh kembangnya sektor industri yang kuat dimasa mendatang.

Tertib dalam arti bahwa setiap warga negara secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang tertib semuanya secara pasti, berpedoman pada sistem ketentuan hukum/perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya disiplin nasional.

Aman dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.

Sehat dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat/manusia penghuninya.

Asri dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa dan di kota dapat serasi, selaras dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan menumbuhkan perasaan kerasan, asri tidak mewah tetapi lebih cenderung memanfaatkan potensi lingkungan yang bersandar pada kreatifitas manusiawi.

Sejahtera dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bantul telah terpenuhi secara lahir dan batin.

Demokratis dalam arti bahwa adaya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat, dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab.

Agamis dalam arti bahwa kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiliusitas dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama tidak diartikan sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut semua agama semestinya dapat diterapkan dalam interaksi sosial sehari-hari

Misi 1
Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik

Misi ini didukung dengan 4 (empat) tujuan, yaitu :

1) Meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintah menuju tata kelola pemerintah yang empatik, didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :
   a) Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah;
   b) Meningkatnya transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi;
   c) Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
2) Meningkatkan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima yang terjangkau masyarakat serta mencakup Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan memenuhi syarat Sistem Manajemen Mutu, didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :
   a) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
   b) Tepat waktu penyelesaian ijin;
   c) Tepat waktu penyelesaian pengaduan;
3) Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, didukung dengan 1 (sasaran) sasaran, yaitu Terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat.
4) Mewujudkan pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur daerah, didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu tersedianya sarana berupa tanah untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum dan pemda

Misi 2
Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Misi ini didukung dengan 8 (delapan) tujuan, yaitu :

1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi masalah kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :
   a. Meningkatnya Desa Siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri);
   b. Menurunnya angka kesakitan penyakit berbasis lingkungan.

3) Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya penduduk miskin memiliki jaminan kesehatan.

4) Meningkatkan kualitas program wajib belajar 9 tahun yang meliputi layanan pendidikan baik pada jenjang pra-sekolah, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan dengan memperhatikan kearifan lokal. Tujuan ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :
   a. Meningkatnya kualitas pendidikan;
   b. Meningkatnya kualitas perpustakaan;
   c. Meningkatnya sekolah berkualitas.

5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan baik jalur formal, non formal, maupun informal. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan nonformal dan informal.

6) Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga. Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :
   a. Meningkatnya prestasi pemuda secara kuantitatif dan kualitatif;
   b. Meningkatnya prestasi olahraga secara kuantitatif dan kualitatif.

7) Mengembangkan pemanfaatan ilmu dan teknologi. Tujuan ini didukung dengan 4 (empat) sasaran, yaitu :
   a. Pengembangan Sistem Informasi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
   b. Tersedianya informasi melalui media massa;

c. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
d. Pengembangan energi baru terbarukan.

8) Memantapkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan. Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :
   a. Meningkatnya jumlah Desa Binaan Keluarga Sakinah(DBKS), Keluarga Sakinah Teladan (KST) dan Pondok Pesantren)PPS);
   b. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama

Misi 3
Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender

Misi ini didukung dengan 10 (sepuluh) tujuan, yaitu :

1) Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan.

2) Meningkatkan mutu konsumsi pangan dan ketersediaan pangan. Tujuan ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :
   a. Meningkatnya ketahanan pangan daerah;;
   b. Meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan serta agropolitan;
   c. Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian.

3) Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap petani, peran serta petani, dan pengembangan program usaha tani. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya program usaha tani dan aktivitas kelembagaan petani dan penyuluh.

4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar, terminal, jalan,dan lain-lain.

5) Meningkatkan pemberdayaan industri kecil, koperasi, dan perdagangan. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya unit-unit usaha industri kecil dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran.

6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kebudayaan dan pariwisata. Tujuan ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :
   a. Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, peristiwa budaya, penghargaan budaya, kelompok kesenian;
   b. Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata;
   c. Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan.

7) Meningkatkan pengembangan kawasan strategis. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Berkembangnya kawasan KPY, BKM, pantai selatan, GMT dan Kajigelem, kawasan industri Sedayu dan Piyungan, kawasan agrowisata dan agropolitan, gumuk pasir Parangtritis, serta kawasan ibukota Kabupaten Bantul.

8) Meningkatkan motivasi dan etos masyarakat berwirausaha, penciptaan peluang kerja, pelatihan keterampilan, serta perlindungan dan pengawasan tenaga kerja. Tujuan ini didukung dengan 5 (lima) sasaran, yaitu :
   a. Meningkatnya keterampilan pencari kerja;
   b. Menurunnya tingkat pengangguran;
   c. Meningkatnya keamanan dan perlindungan pekerja;
   d. Terjaminnya hak-hak dan perlindungan pekerja;
   e. Terciptanya penempatan transmigran.

9) Memantapkan program pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan anak. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu Terwujudnya pemahaman PUG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di semua lapisan masyarakat, organisasi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan.

10) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat baik pada tingkat komunitas (desa), keluarga dan individu. Tujuan ini didukung dengan 4 (empat) sasaran, yaitu :
   a. Meningkatnya partisipasi kompetensi ketrampilan organisasi pemerintahan, masyarakat dan individu;
   b. Meningkatnya kesejahteraan PMKS/tuna sosial serta tertanganinya korban NAPZA dan penduduk usia lanjut;
   c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin;
   d. Meningkatnya kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Misi 4
Meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan

Misi ini didukung dengan 2 (dua) tujuan, yaitu :

1) Memantapkan program penanggulangan bencana. Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :
   a. Mantapnya penanggulangan bencana;
   b. Mantapnya pengelolaan sarana dan prasarana publik

2) Memantapkan program peningkatan kualitas lingkungan dan pengelolaan sumberdaya alam. Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :
   a. Terwujudnya peningkatan pengelolaan SDA, perlindungan fungsi lingkungan dan keanekaragaman hayati;
   b. Terkelolanya sumberdaya hutan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU. Indikator Kinerja yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 dirumuskan kembali menjadi IKU Kabupaten Bantul dan SKPD yang merupakan ukuran keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bantul dan SKPD dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome)* berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Perumusan IKU Kabupaten Bantul tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU Pemerintah Kabupaten Bantul disajikan sebagai berikut :

Tabel II.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
		Nilai EKPPD
2.	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Opini pemeriksaan BPK
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu
		Angka Kematian Bayi
		Persentase Gizi Buruk
		Usia Harapan Hidup
5.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka melek huruf
		Rata-rata lama sekolah
6.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
		Indeks Gini
7.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Tingkat Ketersediaan Energi
		Tingkat ketersediaan Protein
8.	Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata	Persentase peningkatan jumlah wisatawan
9.	Menurunnya tingkat pengangguran	Angka pengangguran
10.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	Persentase jumlah penduduk miskin
11.	Meningkatnya kesiagaan masyarakat terhadap bencana	Persentase Desa Tangguh

Sumber : Bagian Tapem, 2016

3. Tema Pembangunan dan Program Prioritas

Tema pembangunan dalam kurun waktu 2011-2015 sebagai berikut :

Tabel II.2 Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015

2011	2012	2013	2014	2015
Menguatkan Kualitas SDM, memanfaatkan SDA, mengkaji dan mengembangkan inovasi IPTEK berwawasan lingkungan serta memperdayakan Ekonomi Lokal, berbasis penanggulangan bencana	Mengembangkan Kualitas SDM dan IPTEK, mengoptimalkan SDA berwawasan lingkungan serta mengembangkan daya saing Ekonomi Lokal,berbasis penanggulangan bencana.	Meningkatkan kualitas SDM, mengoptimalkan SDA dan IPTEK berwawasan lingkungan serta mengembangkan daya saing daerah, berbasis penanggulangan bencana.	Memantapkan Kualitas SDM, mendayagunakan SDA dan IPTEK yang berwawasan lingkungan, serta mengembangkan daya saing daerah, berbasis penanggulangan bencana.	Mewujudkan kualitas SDM dan IPTEK yang unggul serta pengelolaan SDA dalam rangka mencapai daya saing daerah yang tangguh, berbasis penanggulangan bencana.

Sumber : Bappeda, 2016

Program-program yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Bantul meliputi 11 program, sebagai berikut :

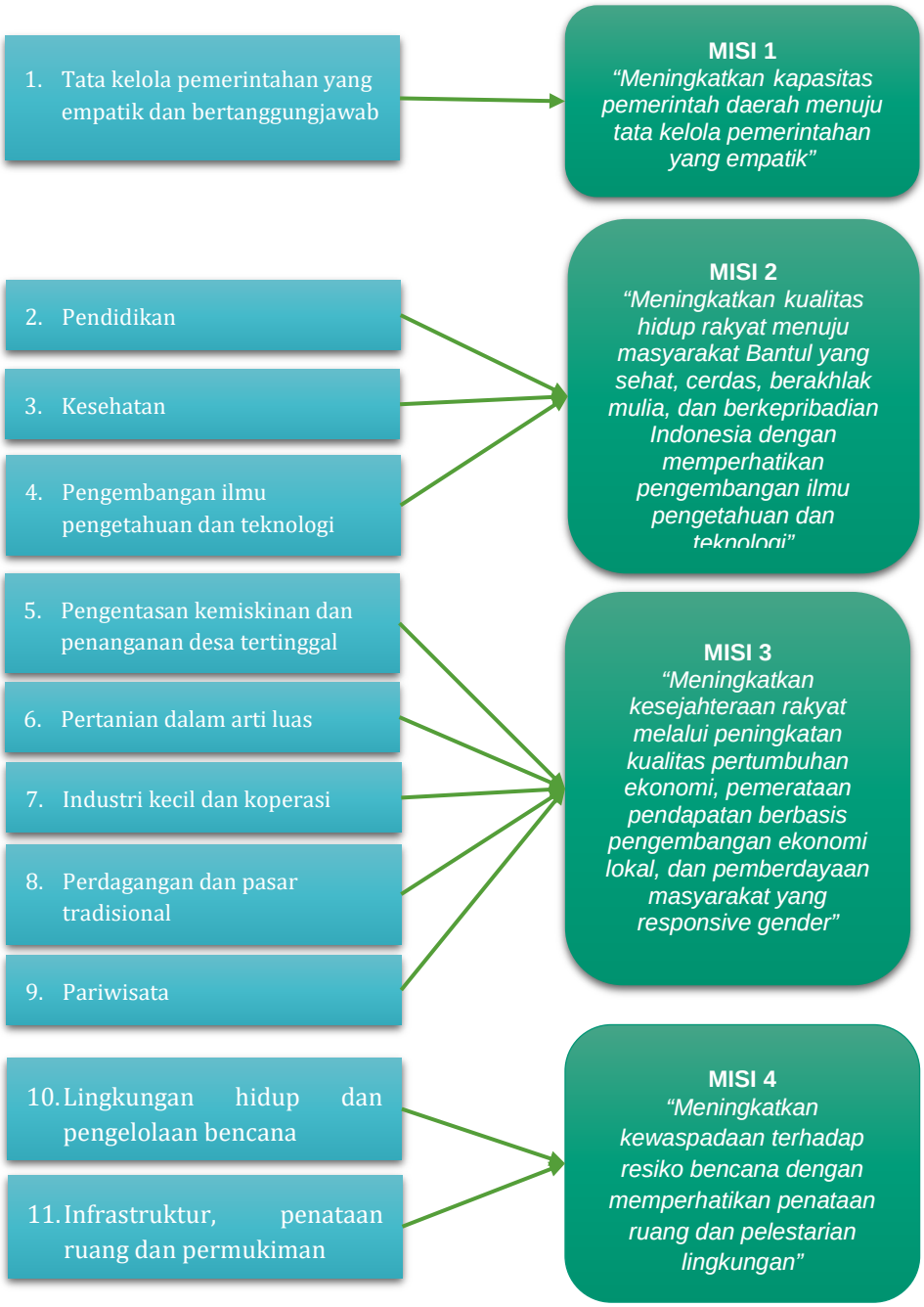

Gambar II.1 Program-Program Prioritas Beserta Korelasinya Terhadap Misi Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015

Uraian prioritas pembangunan ini kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah (5 tahunan).

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.Melalui perjanjian kinerja, terwujudlahkomitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Semua yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2015 merupakan sasaran yang sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2015 dilakukan dengan mengacu kepada Review RPJMD, RKPD 2015, IKU dan APBD. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	B (67)
		Nilai EKPPD	Nilai	Sangat Tinggi (3,2)
2.	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Opini pemeriksaan BPK	Opini	WTP
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Baik (75,67)
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	Angka	70/100.000 KH
		Angka Kematian Bayi	Angka	7/1.000 KH
		Persentase Gizi Buruk	Persen	0,43
		Usia Harapan Hidup	Tahun	71,40
5.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka melek huruf	Persen	93
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,20

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
6.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,88
		Indeks Gini	Indeks	0,2281
7.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Tingkat Ketersediaan Energi	Persen	140,91
		Tingkat Ketersediaan Protein	Persen	136,21
8.	Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata	Persentase peningkatan jumlah wisatawan	Persen	5
9.	Menurunnya tingkat pengangguran	Angka pengangguran	Persen	4,70
10.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	Persentase jumlah penduduk miskin	Persen	12
11.	Meningkatnya kesiagaan masyarakat terhadap bencana	Persentase Desa Tangguh	Persen	13,33

Sumber : Bagian Tapem, 2016

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel II.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2015

No.	Sasaran Strategis	Didukung Jumlah Program
1.	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah	19
2.	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	8
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	9
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	38
5.	Meningkatnya kualitas pendidikan	9

No.	Sasaran Strategis	Didukung Jumlah Program
6.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan	21
7.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	15
8.	Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata	8
9.	Menurunnya tingkat pengangguran	8
10.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	15
11.	Meningkatnya kesiagaan masyarakat terhadap bencana	7

Sumber : Bagian Tapem, 2016, data diolah

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Bab III
Akuntabilitas Kinerja berisi :

A. *Capaian Kinerja Organisasi*
B. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja*
C. *Pencapaian Kinerja Lainnya*
D. *Akuntabilitas Anggaran*
E. *Efisiensi Sumber Daya*

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90,1	Sangat Baik	
2	75,1 ≤ 90	Tinggi	
3	65,1 ≤ 75	Sedang	
4	50,1 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010, diolah

A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 sebagaimana juga telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015

No	Indikator Kinerja Utama	2015		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	67 (B)	70,26 (BB)	104,87
2	Nilai EKPPD	3,2 (Sangat Tinggi)	3,2464 (Sangat Tinggi)	101,45
3	Opini pemeriksaan BPK	WTP	WTP	100
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,67	78,31	103,49
5	Angka Kematian Ibu	70/ 100.000 KH	87,5/ 100.000 KH	75
6	Angka Kematian Bayi	7/ 1.000 KH	8,35/ 1.000 KH	80,71
7	Persentase Gizi Buruk	0,43	0,38	111,63

No	Indikator Kinerja Utama	2015		
		Target	Realisasi	% Realisasi
8	Usia Harapan Hidup	71,4	73,24	102,58
9	Angka melek huruf	93	97,51	104,85
10	Rata-rata lama sekolah	9,2	8,74	95
11	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,88	5,1	86,73
12	Indeks Gini	0,2281	0,3177	60,72
13	Tingkat Ketersediaan Energi	140,91	142,88	101,4
14	Tingkat ketersediaan Protein	136,21	136,49	100,,21
15	Persentase peningkatan jumlah wisatawan	5	8,7	174
16	Angka pengangguran	4,7	4,1	112,77
17	Persentase jumlah penduduk miskin	12	15,16	73,67
18	Persentase Desa Tangguh	13,33	17,33	130,01

Sumber : Bagian Tapem, 2016, data diolah

Catatan :

- Untuk IKU 1, 2, 3, 9 dan 10 merupakan capaian kinerja tahun 2014 yang mendapatkan penilaian pada tahun 2015, sedangkan realisasi kinerja tahun 2015 baru bisa dilihat pada tahun 2016.

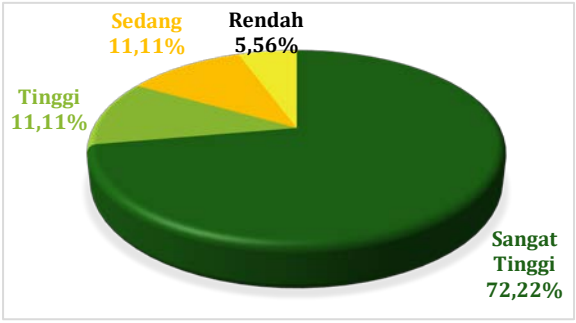

Gambar III.1 Pencapaian IKU Bupati Tahun 2015

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 18 indikator kinerja utama Bupati tahun 2015, disimpulkan bahwa 13 (tiga belas) indikator sasaran atau sebanyak **72,22%** dalam kriteria **Sangat Tinggi**, bahkan 11 (sebelas) IKU diantaranya realisasi mencapai **lebih dari 100%**. Sedangkan 2 (dua) IKU atau 11,11% masuk dalam kriteria **Tinggi,** 2 (dua) IKU atau 11,11% masuk dalam kriteria **Sedang,**.dan 1 (satu) IKU atau 5,56% masuk dalam kriteria **Rendah**.

IKU yang masuk kriteria **Tinggi** dari target yang ditetapkan yaitu Angka Kematian Bayi, terealisir 80,71% dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi terealisisr 86,73%. IKU yang masuk kriteria **Sedang** adalah IKU Angka Kematian Ibu terealisir 75%, Persentase jumlah penduduk miskin, yang terealisir 73,67% dari target yang ditetapkan.

Sedangkan IKU yang masuk kriteria **Rendah** yaitu IKU Indeks Gini yang realisasinya mencapai 60,72% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah dan Desa serta Lembaga Pemerintah Daerah

Tata kelola pemerintahan yang baik lazim di gambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga kata kunci ini menunjukkan juga pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah yang lain. Karenanya, partisipasi dan transparansi juga menjadi kunci selain akuntabilitas untuk membuat pengelolaan publik dengan lebih terbuka dan memberi ruang bagi berbagai pihak.

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah dan Desa serta Lembaga Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD (2015)	Capaian s/d 2015 terhadap 2015 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	B (65,03)	B (67)	BB (70,26)	104,87	B (67)	104,87
2.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (3,177)	Sangat Tinggi (3,2)	Sangat Tinggi (3,2464)	101,45	Sangat Tinggi (3,2)	101,45

Sumber : Bagian Tapem, 2016, data diolah

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

   Akuntabilitas pemerintah menunjukkan pergeseran baru dalam relasi antara pemerintah dengan publik. Konsep akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggung-jawabkan mandat yang diberikan publik untuk mengelola urusan-urusan publik, dengan

memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, perhatian Pemerintah Kabupaten Bantul akan pentingnya akuntabilitas terlihat dalam rumusan misi 1, yaitu "Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Empatik".

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2015 adalah nilai 67 (kategori B), realisasi mendapatkan nilai 70,26 (kategori BB), tercapai 104,87% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2014 sebesar 65,03 dengan kategori B, sedangkan realisasi nilai akuntabilitas kinerja tahun 2015 sebesar 70,26. Sebagai catatan, kinerja ini adalah realisasi nilai akuntabilitas kinerja tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2014, sedangkan realisasi nilai akuntabilitas kinerja tahun 2014 sedianya dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2015, namun dilaksanakan pada awal 2016. Sedangkan target capaian tahun 2015 (akhir RPJMD) yaitu kategori B (nilai 67). Capaian tahun 2015 ini telah menyumbangkan 104,87% dari target akhir RPJMD tahun 2015.

Gambar III.2 Penjabat Bupati Bantul, Bapak Drs. Sigit Sapto Raharjo, MM dalam Penerimaan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015

Dalam penyerahan laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 terdapat 5 Kabupaten/Kota yang mendapatkan predikat BB dari 156 Kabupaten/Kota se Sumatera dan DIY. Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang berhasil meraih peringkat BB bersama Kabupaten Sleman, Kota Tanjung Pinang,

Kota Yogyakarta dan Kabupaten Karimun. Prestasi ini tercapai karena adanya komitmen semua pihak, yaitu dari pucuk pimpinan sampai pada tataran pelaksana.

Penilaian tersebut menunjukaan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Bantul sudah menunjukkan hasil yang baik.. Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat beberapa hal penting dari penilaian akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu :

a. Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh nilai 70,26 atau predikat BB. Rincian hasil penilaian sebagai berikut :
   - Perencanaan kinerja, nilai 20,77
   - Pengukuran kinerja, nilai 17,31
   - Pelaporan kinerja, nilai 11,06
   - Evaluasi kinerja, nilai 5,89
   - Capaian kinerja, nilai 15,23
b. Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul.
c. Pemerintah Kabupaten Bantul telah membangun akuntabilitas kinerja pada tingkat pemerintah kabupaten dan SKPD dengan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.
d. Secara umum atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul adalah baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan yang akan datang, agar akuntabilitas kinerja pada pemerintah kabupaten dan SKPD terus meningkat secara berkelanjutan dari tahun ke tahun.

Langkah strategis yang akan dilaksanakan guna meningkatkan system akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

a. Melakukan penyempurnaan terhadap sasaran strategis serta Indikator Kinerja baik di dokumen RPJMD maupun Renstra SKPD.
b. *Cascading* Perjanjian Kinerja telah dilakukan sampai ke eselon III dan IV, namun masih perlu adanya penyempurnaan, baik pada Indikator Kinerja Utama, maupun indikator di level eselon III dan IV, sehingga dapat tercipta keselarasan penjabaran *(cascade down)* kinerja dari level Kabupaten sampai ke individu pegawai;
c. Menyempurnakan aplikasi keuangan dan kinerja yang ada sehingga selain dapat mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja namun juga dapat

memudahkan penggunaannya baik oleh manajemen maupun petugas yang melaksanakan;

d. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap SKPD, serta kualitas evaluasi program;
e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara aktif terhadap capaian kinerja, baik di tingkat Kabupaten maupun di SKPD masing-masing, sebagai dasar penerapan pemberian *reward and punishment*, dalam rangka semakin mendorong terciptanya manajemen berbasis kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Beberapa hal telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mendorong akuntabilitas juga bisa dilihat dari upaya menindaklanjuti Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government dengan membangun ***Bantul Cyber City*** **y**ang dititikberatkan pada program *Digital Government Services* (DGS) sebagai panduan strategis implementasi dan pengembangan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul*.* Pengembangan e-gov bertujuan untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan

E-government telah diaplikasikan didukung dengan sarana dan prasarana pengembangan jaringan internet yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi internal pemerintahan, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Keuntungan dari *e-government* adalah peningkatan efisiesi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Selain penyajian informasi dan aplikasi *e-gov* melalui *website*, Pemerintah Kabupaten Bantul juga sudah menerapkan aplikasi web di sub domain dan 15 aplikasi berbasih *desktop* maupun *online.*

Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet dan Intranet pada Tahun 2015 sudah mencapai **132 Titik/site** yang meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan dan seluruh Pemerintahan Desa di wilayah Kabupaten Bantul. Struktur sebaran Infrastruktur Jaringan Internet dan Intranet di lingkungan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

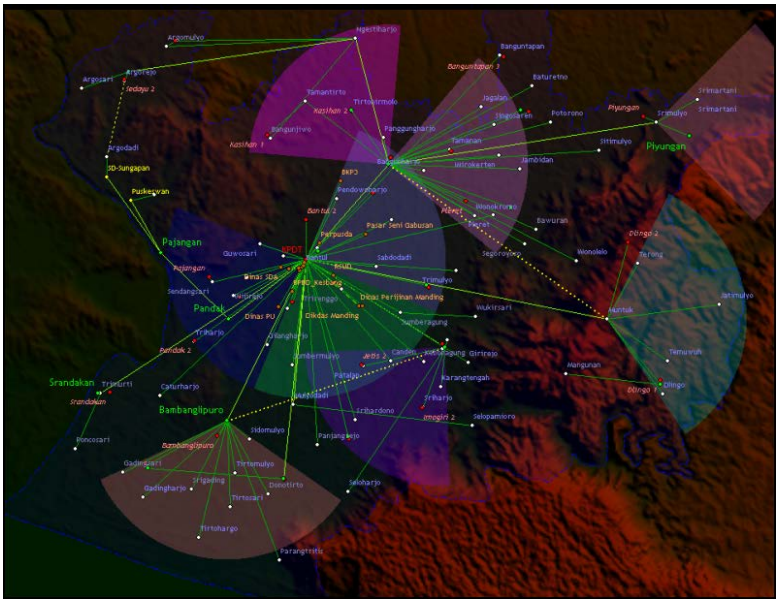

Gambar III.3 Struktur Sebaran Infrastruktur Jaringan Internet dan Intranet

Gambar III.4 LPSE Kabupaten Bantul

Perbaikan sistem manajemen pemerintahan berkaitan manajemen kinerja antara lain diterapkan pada pengadaan barang dan jasa menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektonik (LPSE). Pengumuman pengadaan barang dan jasa untuk tahun 2015 bisa diakses melalui http://lpse.bantulkab.go.id.

Dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan ini, partisipasi masyarakat juga didorong melalui pengembangan aplikasi dan ruang keterlibatan publik dalam sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan. Masyarakat bisa mengakses informasi-informasi untuk pelaksanaan pembangunan dengan masuk ke tautan

esakip.bantulkab.go.id. Dengan menggunakan user name dan password 'publik', masyarakat bisa mendapatkan informasi memadai tentang bagaimana pelaksanaan dan kinerja pembangunan di Kabupaten Bantul untuk kurun waktu tertentu. eSAKIP ini juga sebagai sistem yang digunakan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD dalam waktu per tiga bulan/triwulanan. Berikut adalah tampilan awal untuk akses publik tersebut.

Gambar III.5 Tampilan Halaman Depan Esakip Bantul

Dalam rangka mendukung akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bantul juga telah dilakukan Evaluasi Kinerja terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mendasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2015. Dari evaluasi kinerja tersebut dihasilkan 3 (tiga) SKPD peraih nilai tertinggi dan 3 (tiga) SKPD peraih nilai terendah.

2. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

   Dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, perhatian Pemerintah Kabupaten Bantul akan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik terlihat dalam rumusan misi 1, yaitu "Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Empatik".

   Target tahun 2015 dengan nilai 3,2 (Sangat Tinggi), terealisir 101,45%. Capaian nilai EKKPD tahun 2015 ini didapatkan dari target nilai 3,2 (Sangat Tinggi) terealisir sebesar 3,264 (Sangat Tinggi). Jika dilihat dari nilai hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2014 yaitu skor 3,177, mengalami peningkatan sebesar 0,0694. Tahun 2015 Bantul menduduki peringkat 8 (delapan) atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2013 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

   Nilai ini mengalami peningkatan dikarenakan pemenuhan dalam sistem penilaiannya yang menggunakan data pendukung, yang disajikan sesuai dengan

LPPD yang dilaporkan. Kedepan akan terus upaya untuk meningkatkan hasil EKPPD dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

a. Koordinasi dengan SKPD lebih ditingkatkan
b. Melakukan pendampingan kepada SKPD dalam penyusunan LPPD
c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Daerah (BPKP dan Inspektorat DIY) dan Tim Pusat (Kementerian Dalam Negeri)
d. Merintis pembuatan SIM LPPD untuk mempermudah penyusunan LPPD

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah daerah. Pada tahun 2015, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri 19 (sembilan belas) program sebagai berikut :

1. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
3. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
4. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
6. Program Pengembangan Sarana Prasarana dan Kelembagaan Kelautan dan Perikanan
7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
8. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit
11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
12. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
13. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
14. Program Perencanaan Tata Ruang
15. Program Fasilitasi Pembahasan Produk Hukum DPRD/Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah?
16. Program Pengembangan Sarana Prasarana dan Kelembagaan Kelautan dan Perikanan
17. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
18. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
19. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Permasalahan :

a. Proses perbaikan memerlukan SDM yang *open mind* atas segala pembaharuan;
b. Masih lemahnya sistem pengumpulan dan pengukuran data kinerja berbasis teknologi informasi sehingga dapat menghasilkan data kinerja yang cepat dan akurat. Berbagai aplikasi yang ada masih belum terintegrasi dalam satu system yang memudahkan adanya pertukaran data.
c. Masih lemahnya kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja, bidang perencanaan dan evaluasi khususnya di jajaran SKPD secara berkelanjutan untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

Solusi :

a. Meningkatkan koordinasi, persamaan persepsi dan pelatihan di seluruh SKPD.
b. Membangun sistem terintegrasi sebagai basis data dan pelaporan yang efektif serta transparan bagi masyarakat sebagai upaya pembangunan sistem pengumpulan dan pengukuran data kinerja berbasis teknologi informasi sehingga dapat menghasilkan data kinerja yang cepat dan akurat.
c. Melakukan pendampingan dan pelatihan dengan ahli/narasumber dari pihak yang berwenang, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi dan narasumber lain yang kompeten.

Untuk rencana kedepan akan terus dilakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan seluruh SKPD dan pihak yang berkompeten, peningkatan SDM melalui pelatihan bagi seluruh SKPD dan perbaikan kinerja sebagai upaya peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah dan Desa serta Lembaga Pemerintah Daerah melalui peningkatan akuntabilitas kinerja seluruh SKPD yang pada akhirnya adalah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

2. Sasaran Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Pelaksanaan indikator Opini Pemeriksaan BPK sejalan dengan misi "Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Empatik" yang menjadi misi 1 dalam RPJMD 2011-2015. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk menilai sejauh manakah penilaian yang obyektif bisa dilakukan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan.

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan dengan mendasarkan pada UU No. 15 tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap Neraca, Laporan Realisasi Angaran, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan. Opini yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD (2015)	Capaian s/d 2015 terhadap 2015 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Opini pemeriksaan BPK	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100

Sumber : Inspektorat dan DPPKAD, 2015, data diolah

Realisasi atas target kinerja yang ditetapkan menunjukkan hasil sangat baik. Pada tahun 2015, target kinerjanya adalah pemeriksanaan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan hasilnya mencapai target ini. Dengan status pencapaian opini yang terbaik ini, maka kinerja sasaran ini adalah **Sangat Tinggi.**

Pencapaian WTP ini merupakan ini merupakan tahun ketiga. Pencapaian ini, apabila dipertahankan, capaian ini juga sudah memenuhi target pada akhir tahun RPJMD pada tahun 2015 yaitu opini WTP. Realisasi ini juga merupakan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul untuk tahun 2014 yang dikeluarkan BPK pada tahun 2015. Hal ini didukung adanya komitmen Bupati, Wakil Bupati, Sekertaris Daerah dan seluruh jajaran pimpinan di seluruh Kabupaten Bantul, diperkuat juga adanya penandatanganan Pakta Integritas untuk mempertahankan opini tersebut. Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2012-2015 sebagai berikut :

Tabel III.5 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul
Tahun 2012 – 2015

Tahun	Opini BPK	Keterangan
2012	WDP	Perhatian khusus penggunaan langsung dana Jamkesos, Penatausahaan dana bergulir, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan adanya selisih nilai aset tetap hasil inventarisasi yang tidak dapat dijelaskan
2013	WTP	Paragraf penjelas berupa penyajian Investasi Non Permanen (dan bergulir) dan penyajian belanja bantuan keuangan alokasi dana desa

Tahun	Opini BPK	Keterangan
2014	WTP	Paragraf penjelas masih adanya Dana Alokasi Desa (ADD), Piutang PBB dan aset tetap belum seluruhnya disajikan dengan informasi yang lengkap dan jelas
2015	WTP	Paragraf penjelas berupa dana hibah KONI untuk PERSIBA, Dana Alokasi Desa (ADD), aset tetap, serta proses pengadaan tanah pengganti tanah kas desa yang belum selesai dilaksanakan

Sumber : DPPKAD, 2016

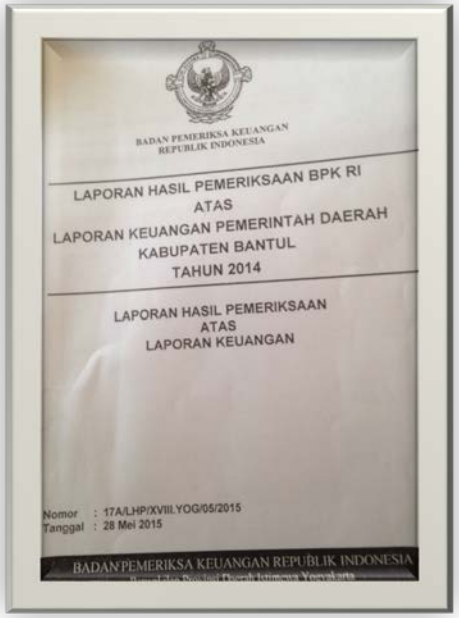

Gambar III.6 WTP tahun ketiga bagi Bantul

Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan. Hal ini meliputi penilaian atas prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan dalan dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Juga penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh.

Faktor lain yang menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Tahun anggaran 2015 telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 79 obyek pemeriksaan dengan pemeriksaan berkala sebanyak 56 obrik, 23 obyek pemeriksaan dengan tujuan tertentu/khusus. Hasil pemeriksaan berupa temuan/rekomendasi sebanyak 381, dan telah ditindak lanjuti sejumlah 321 rekomendasi.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Pada tahun 2015, berbagai program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 8 (delapan) program sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan SKPD
2. Program Penataan Peraturan Peundang-undangan

3. Program Pengelolaan Barang Daerah
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
6. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
8. Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur

Permasalahan :

1. Tindak lanjut hasil pengawasan Eksternal dan Internal dari Audit yang belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan dalam menindaklanjuti hasil temuan.
2. Terbatasnya sumberdaya manusia aparatur pengawas/auditor.
3. Masih terdapat beberapa SKPD dalam pengelolaan barang daerah belum tertib.

Solusi :

1. Penguatan tindaklanjut hasil pengawasan Eksternal dan Internal dengan pembuatan regulasi, sosialisasi, kordinasi intensif, serta penguatan komitmen auditan dalam melaksanakan penyelesaian tindaklanjut pengawasan.
2. Mengajukan formasi auditor/P2UPD dan mengirimkan diklat fungsional/substantif ke lembaga diklat yang berkompeten.
3. Penguatan Komitmen seluruh Kepala SKPD dalam penerapan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kedepan akan terus diupayakan langkah-langkah guna mempertahankan opini WTP, yaitu tetap diperlukan penguatan komitmen seluruh pihak, baik pimpinan puncak maupun Kepala SKPD serta seluruh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul.

3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik merupakan dukungan terhadap misi 1 ”Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Empatik”. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah di berbagai sektor layanan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar yang dirasakan tidak sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Dalam hal pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, dan diperkuat dengan terbitnya surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 4/M/PAN-RB/03/2012 tentang pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada seluruh unit penyelenggara pelayanan publik. UPP yang melaksanakan survey IKM meliputi 17 kecamatan, 27 Puskesmas, 42 SKPD, dan 3 BUMD

Tabel III.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD (2015)	Capaian s/d 2015 terhadap 2015 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,90	75,67	78,31	103,49	75,67	103,58

Sumber : Bagian Organisasi, 2016, data diolah

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2015, capaian kinerjanya **Sangat Tinggi**. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target nilai 75,67, realisasi IKM tahun 2015 IKM mencapai angka 78,31 atau 103,49 dari target kinerja. Dengan pencapaian ini pula, telah mencapai 103,49% dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2015, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

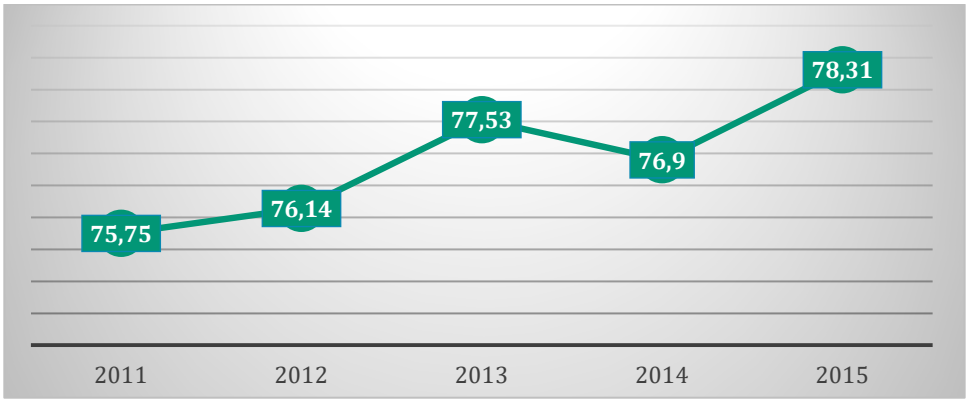

Gambar III.7 Perkembangan IKM Tahun 2011-2015

Nilai IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) Kabupaten Bantul pada tahun 2011 sebesar 75,75, tahun 2012 nilai IKM adalah 76,14 tahun 2013 sebesar 77,53, tahun 2014

sebesar 76,9 dan tahun 2015 sebesar 78,31. Nilai IKM tersebut didapat dari rangkuman nilai IKM SKPD Pemberi Layanan se Kabupaten Bantul. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik (UPP).

Permasalahan atas sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yaitu adanya tuntutan kepuasan responden yang semakin tinggi, sedangkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Gambar III.8 Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Ir. Fenty Yusdayati, MT bersama Sekretaris Daerah, Drs. Riyantono, M.Si menerima Tim Audit Badan Sertifikasi NQA Indonesia

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada tahun 2015, berbagai program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri 9 (sembilan) program sebagai berikut :

1. Program Kerjasama Pembangunan
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit
6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
8. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

4. Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel III.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD (2015)	Capaian s/d 2015 terhadap 2015 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Angka Kematian Ibu	104,7/ 100.000 KH	70/ 100.000 KH	87,5/ 100.000 KH	75	70/ 100.00 0 KH	75
2.	Angka Kematian Bayi	8,75/ 1.000 KH	7/ 1.000 KH	8,35/1.000 KH	80,71	7/1.000 KH	80,71
3.	Persentase Gizi Buruk	0,38	0,43	0,38	115,56	0,43	115,56
4.	Umur Harapan Hidup	73,22	71,4	73,24	100,34	71,5	100,34

Sumber : Dinas Kesehatan, 2016, data diolah

Sasaran ini merupakan dukungan misi 2 ”Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia,dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Selengkapnya masing-masing IKU dijelaskan sebagai berikut :

1. Angka Kematian Ibu

   Pencapaian AKI pada tahun 2015 sebesar 87,5/100.000 KH, mengalami penurunan kematian dibanding tahun 2014 sebesar 104,7/100.000 KH dari target 70/100.000 KH dengan nilai realisasi kinerja sebesar 75,00% dalam kriteria **Sedang.**

   Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas pada tahun 2015 sebanyak 11 orang. Capaian tahun 2015 menyumbangkan angka 75% atas target RPJMD tahun 2015, diharapkan AKI hanya terealisir 70/100.000 KH. Selanjutnya kecenderungan AKI pada lima tahun terakhir disajikan sebagai berikut :

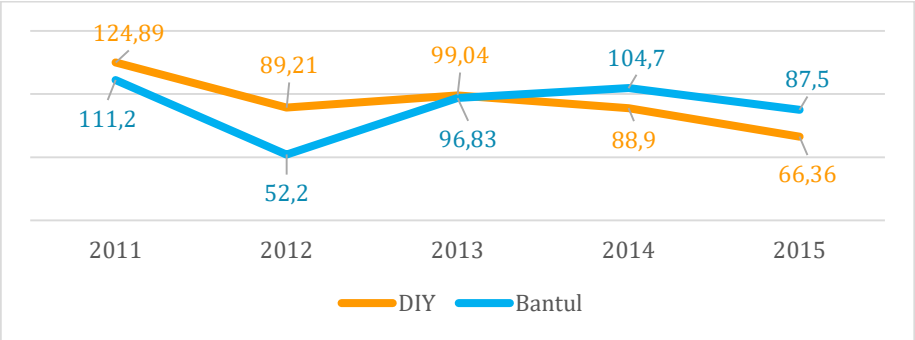

Sumber : Dinas Kesehatan, 2016

Gambar III.9 *Trend* AKI Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015

Trend AKI mengalami fluktuasi. Semua kejadian kematian ibu di Kabupaten Bantul telah dilakukan Audit Maternal Perinatal yang dilaksanakan dalam rangka mengkaji hal–hal yang terkait dengan riwayat dan kondisi ibu sejak masih hamil, proses dan penatalaksanaan persalinan serta kronologis kasus sampai terjadinya kematian. Kajian audit diperoleh hasil bahwa penyebab kematian akibat penyakit penyerta dan penyulit pada ibu seperti penyakit paru, eklampsia dan emboli air ketuban, sebanyak 7 kasus (64%). Sedangkan kematian ibu yang lainnya disebabkan oleh faktor yang berhubungan langsung dengan kehamilannya, seperti perdarahan. Kondisi ini yang menjadi faktor penyulit selama kehamilan dan meskipun penanganan sudah optimal tetap akhirnya tidak terselamatkan.

Penyebab kematian ibu memang mengalami pergeseran semenjak tahun 2014 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kematian ibu di tahun 2014 dan 2015 sebagian besar disebabkan oleh penyakit penyerta. Sementara itu kasus kematian ibu karena perdarahan tahun 2015 hanya sebesar 36% (4 kasus). Begitu juga kematian ibu karena infeksi tidak ditemukan di tahun 2015. Semakin rendah angka perdarahan dan infeksi maka pelayanan kesehatan ibu dapat dikatakan semakin baik.

Tindaklanjut kedepan berupa pendampingan terfokus pada ibu hamil dengan penyakit penyerta maupun penyulit kehamilan. Perlu dibentuk kelas bumil di puskesmas untuk lebih menjamin kontinyuitas edukasi dan juga pemeriksaan oleh dokter spesialis obsgin di puskesmas. Perlu juga dikembangkan edukasi perawatan kehamilan melalui media sosial yang memudahkan untuk diakses oleh ibu hamil secara kontinyu.

Gambar III.10 Kepala Dinas Kesehatan, drg. Maya Sintowati Pandji, MM bersama Asisten Administrasi Umum, Sunarto, SH., MM menerima Tim Verifikasi Manggala Karya Bakti Husada

2. Angka Kematian Bayi

Kasus kematian bayi tahun 2015 sebanyak 105 kematian atau AKB sebesar 8,35 per 1.000 KH, dari target 7/1000 KH dengan nilai realisasi kinerja sebesar 80,71% termasuk kategori **Tinggi,** dan mengalami penurunan kematian dibandingkan tahun 2014 sebanyak 117 kasus kematian atau AKB sebesar 8,75 per 1.000 kelahiran hidup. Kecenderungan Angka Kematian Bayi pada lima tahun terakhir dari tahun 2011 - 2015 disajikan dalam gambar berikut ini :

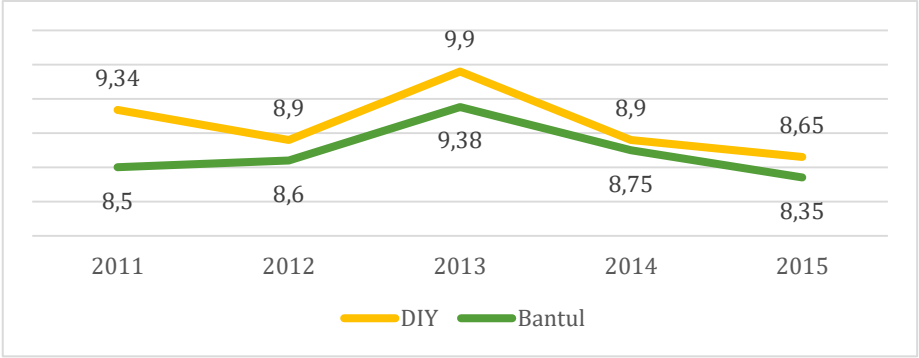

Sumber : Dinas Kesehatan, 2016

Gambar III.11 *Trend* Angka Kematian Bayi Tahun 2011 – 2015

Kasus kematian bayi tahun 2015 sebagian besar yaitu 51 kasus(48.6%) karena kasus neonatal dengan komplikasi yang sulit ditangani yaitu karena kasus

kelainan kongenital berat dan kasus BBLR (Berat Badan Lahir Rendah). Kasus janin dengan kelainan kongenital secara medis sudah ada pada tahap tidak bisa dilakukan intervensi. Kasus BBLR juga merupakan kasus yang memerlukan penanganan khusus dan hasilnya sangat tidak bisa ditebak, apalagi jika BBLR-nya ekstrim, sehingga kasusu ini sulit diselamatkan.

Penyebab kematian bayi juga mengalami pergeseran mulai 2 tahun terakhir. Kasus kematian karena infeksi,dan asfiksia mulai menurun digantikan dengan kasus kelainan kongenital dan BBLR. Hal ini menandakan peningkatan dalam pelayanan neonatal dan bayi.

Kasus kelainan kongenital yang banyak ini ditindak lanjuti dengan pemetaan kasus diikuti dengan pemetaan faktor risiko dan upaya skrining penyakit ibu sebelum kehamilan. Kasus BBLR yang masih banyak memerlukan upaya peningkatan kualitas ANC (Antenatal Care) dimana diperlukan adanya peningkatan ANC terpadu didukung peningkatan kelas ibu hamil untuk menjaga kontinyuitas konseling,edukasi dan informasi kepada ibu hamil. Juga diperlukan adanya terobosan pemberian informasi melalui media yang bisa diakses oleh ibu hamil langsung secara kontinyu.

Pada akhir RPJMD tahun 2015 realisasi angka kematian bayi diharapkan dapat ditekan sehingga mencapai 7/1.000 KH, terealisir 8,35/1.000 KH. AKB menurut penyebab kematian disajikan sebagai berikut :

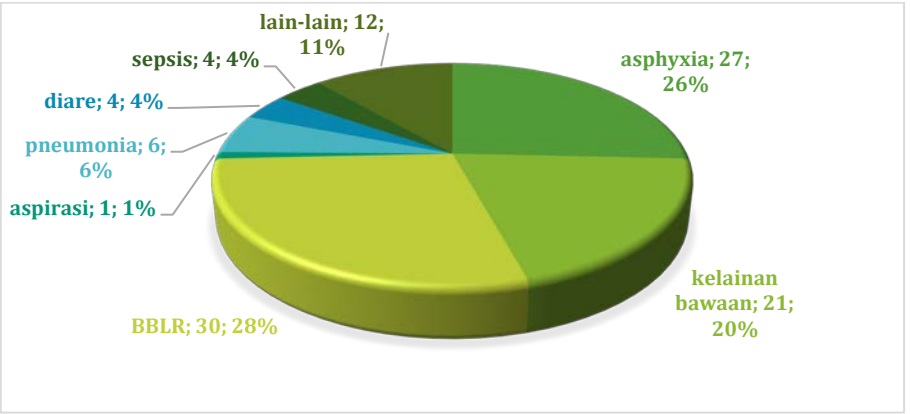

Sumber : Dinas Kesehatan, 2016

Gambar III.12 Kematian Bayi berdasarkan Penyebab Kematian

3. Persentase Gizi Buruk

Persentase gizi buruk balita menunjukkan keberhasilan, dimana tahun 2015 capaian kinerjanya melebihi target. Dari target 0,43% terealisasi 0,38%, atau 111,63% masuk dalam kriteria **Sangat Tinggi**. Pencapaian ini telah mencapai 111,63% dari target akhir RPJMD tahun 2015. Persentase gizi buruk dari tahun ke tahun terus menurun sesuai dengan harapan, dapat dilihat dalam gambar berikut :

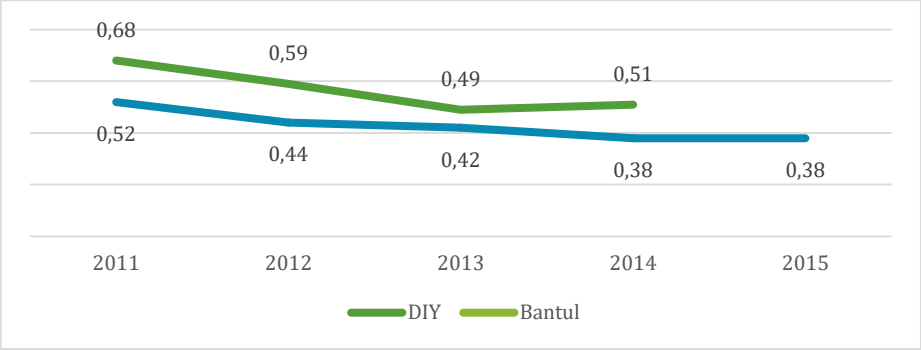

Sumber : Dinas Kesehatan, 2016

Gambar III.13 Trend Gizi Buruk Tahun 2011 – 2015

Mencermati grafik diatas, terdapat kecenderungan penurunan status gizi buruk pada Balita. Pemantauan Status Gizi Balita di Kabupaten Bantul pada tahun 2015 dilaporkan Balita gizi buruk ada 195 Balita, dengan jumlah Laki-laki 108 Balita dan Perempuan 87 Balita. Prevalensi Balita gizi buruk tersebut sesuai standar Berat Badan menurut Umur (BB/U) sebesar 0,38%. Sedangkan untuk status gizi balita sesuai standar Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB), yang lebih menggambarkan kondisi sesungguhnya balita saat ini, tahun 2015 sebanyak 40 kasus balita gizi buruk. Kasus gizi buruk pada Balita tertinggi ada di wilayah Puskesmas Piyungan sebanyak 7 kasus.

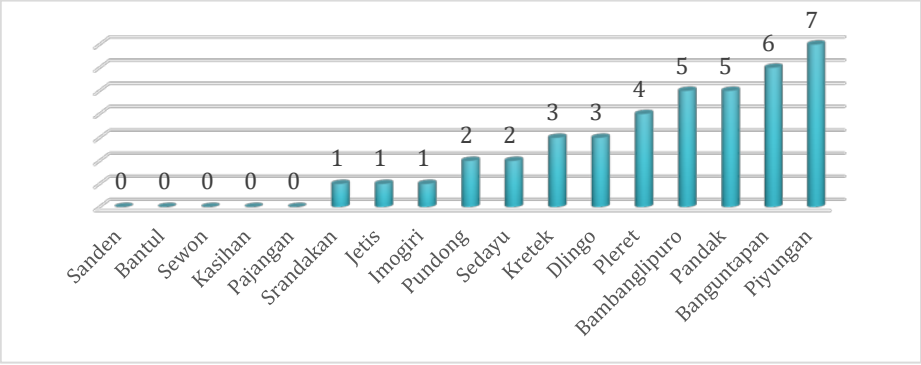

Gambar III.14 Kasus Gizi Buruk Tahun 2015

Intervensi yang telah dilakukan melalui program perbaikan gizi mencakup beberapa kegiatan yaitu surveilans gizi, konsultasi, pemeriksaan balita oleh dokter ahli, pemantauan ASI Eksklusif dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) serta pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Pendukung Ibu (KP-Ibu). Upaya lain yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita Gizi Buruk berupa bantuan makanan tambahan selama 180 hari makan anak bagi 205 Balita serta kunjungan dan pemeriksaan oleh dokter ahli anak di Puskesmas. Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan dari keluarga miskin sudah tercapai 100%. Selain itu, upaya perbaikan gizi juga dilakukan dengan PMT bagi 214 ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) untuk 90 hari makan.

4. Umur Harapan Hidup

Indikator Umur Harapan Hidup menunjukkan keberhasilan dimana tahun 2015, capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 71,4 tahun terealisasi 73,24 tahun atau 102,58% atau masuk dalam kriteria **Sangat Tinggi**. Pencapaian ini telah mencapai 102,58% dibandingkat target pada akhir RPJMD tahun 2015, diartikan telah melampaui pencapaian target pada akhir RPJMD.

Umur Harapan Hidup (UHH) pada waktu lahir (eo) adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh sekelompok orang yang dilahirkan pada suatu waktu tertentu jika pola mortalitas untuk kelompok umur tersebut bersifat tetap pada masa mendatang. UHH menjadi suatu indikator peningkatan derajat kesehatan.

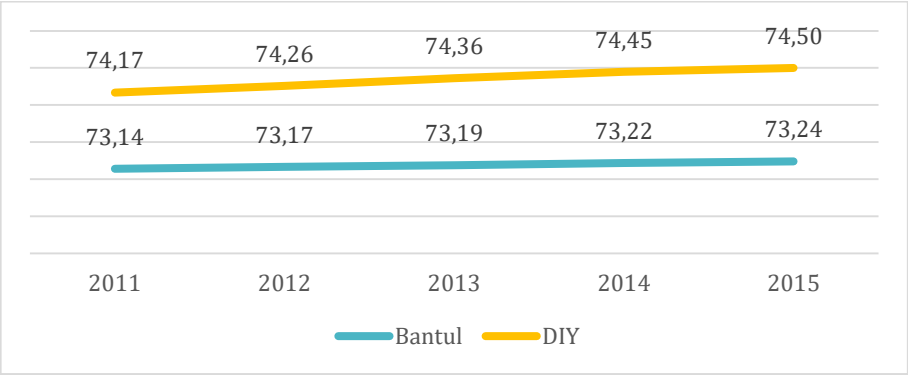

Sumber : BPS, 2016

Gambar III.15 Perkembangan Umur Harapan Hidup Tahun 2011 - 2015

Trend Umur harapan hidup di Kabupaten Bantul cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada gambar berikut. UHH pada tahun 2011 sebesar 73,14 tahun, tahun 2012 sebesar 73,17, tahun 2013 sebesar 73,19, tahun 2014 sebesar

73,22 tahun dan tahun 2015 sebesar 73,24 tahun. Peningkatan UHH ini dipengaruhi oleh multifaktor, antara lain faktor kesehatan menjadi salah satu yang berperan penting didalamnya.

Gambar III.16 Mbah Ponikem Pembatik Tulis dari Imogiri Bantul

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan umur harapan hidup penduduk dari suatu daerah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang umur harapan hidupnya.

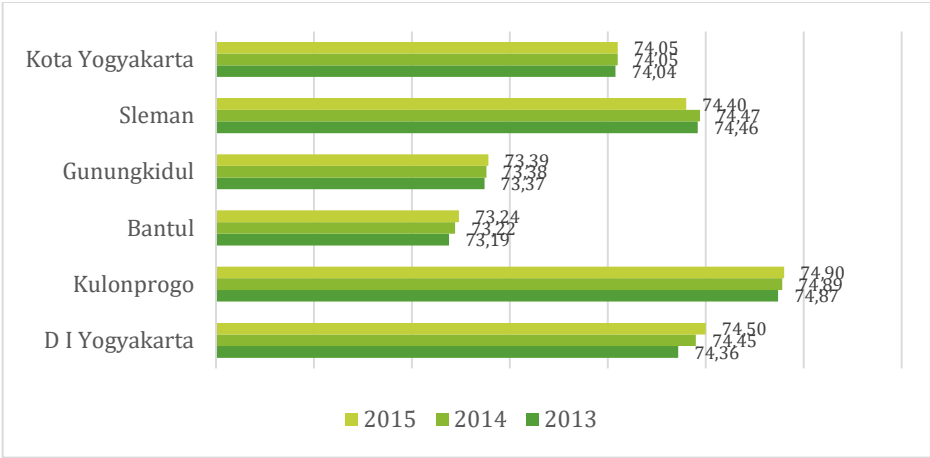

Gambar III.17 UHH Kabupaten/Kota di Wilayah DIY Tahun 2013 – 2015

Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas menjadi faktor penting dalam pembangunan kesehatan. Hal ini juga perlu diikuti dengan kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, mekanisme sistem rujukan yang efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan medis, birokrasi pelayanan kesehatan yang sederhana dan perilaku lingkungan pelayanan kesehatan.

Gambar III.18 Penyuluhan Kesehatan Jiwa oleh Dokter Psikiatri

Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya rasio dokter umum dibanding jumlah penduduk adalah 40/100.000 penduduk. Dengan demikian pada tahun 2015, Kabupaten Bantul membutuhkan dokter umum sejumlah 389 orang. Rasio dokter spesialis adalah 6/100.000 penduduk atau dibutuhkan sejumlah 58 dokter spesialis. Rasio ketersediaan tenaga dokter umum di Kabupaten Bantul mengalami kenaikan pada angka 11 di tahun 2011 sampai tahun 2013 sebesar 13, sedangkan pada tahun 2014 dan tahun 2015 sebesar 11. Rasio ini menunjukkan jumlah dokter yang tersedia per 100.000 penduduk. Sedangkan untuk rasio dokter spesialis meningkat dari 4,3 pada tahun 2011, menjadi 4,8 pada tahun 2012, pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 4,0. Sedangkan tahun 2015 rasio dokter spesialis meningkat menjadi 5,0. Hal ini menunjukkan masih kurangnya tenaga dokter umum maupun spesialis di Kabupaten Bantul.

Tabel III.8 Jumlah Dokter Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Dokter Umum	101	114	123	106	103
2	Jumlah Dokter Spesialis	40	45	38	39	46
3	Jumlah Penduduk	921.253	930.276	938.433	968.632	971.511

4	Rasio Dokter Umum (per 100.00 penduduk)	11	12	13	11	11
5	Rasio Dokter Spesialis (per 100.000 penduduk)	4,3	4,8	4,0	4,0	5,0

Sumber : Dinas Kesehatan, 2016

Jangkauan atau akses pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas telah menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Bantul. Setiap kecamatan sudah memiliki puskesmas dengan jumlah puskesmas 27 unit pada 17 kecamatan. Sudah hampir seluruh desa di Kabupaten Bantul memiliki puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu di Kabupaten Bantul sebanyak Pustu 67 unit pada 75 Desa. Kondisi wilayah sebagian besar adalah dataran yang cukup menguntungkan bagi masyarakat karena mudah dalam menjangkau dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, dengan jarak terjauh dari desa dalam satu Kecamatan ke Pusat Kesehatan Masyarakat hanya ± 3 Km.

Tabel III.9 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum	2011 (unit)	2012 (unit)	2013 (unit)	2014 (unit)	2015 (unit)
1	Rumah Sakit Umum	9	10	10	10	10
2	Rumah Sakit Khusus	3	3	4	4	4
3	Balai Pengobatan	70	55	29	25	0
4	Rumah Bersalin	33	22	18	14	0
5	Klinik Pratama	-	-	-	12	32
6	Klinik Utama	-	-	-	2	2
7	Klinik Rawat Inap Medik Dasar	-	3	5	5	5
8	Apotek	108	100	106	110	114
9	Toko Obat	3	2	1	1	4
10	Laboratorium Kesehatan	4	3	3	4	4
11	Optik	11	12	11	11	11
12	Puskesmas Rawat Inap	16	16	16	16	16
13	Puskesmas Non Rawat Inap	11	11	11	11	11
14	Puskesmas Pembantu	67	67	67	67	67
15	Posyandu	1123	1.123	1.128	1.132	1.132
16	Industri Kecil Obat Tradisional	-	-	4	14	18
17	Pengobat Tradisional	-	-	146	174	135

Sumber : Dinas Kesehatan, 2016

Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Bantul cukup banyak dan merata di seluruh kecamatan terutama sarana pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yaitu Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu.

Gambar III.19 Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Banguntapan III, Bantul

Selain itu, data penting yang terkait dengan pencapaian sasaran peningkatan angka harapan hidup adalah cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan sebanyak 946.327 jiwa (97,69%).

Tabel III.10 Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Tahun 2015

No.	Jenis Kepesertaan	Jumlah Peserta (jiwa)
1	BPJS	
	a. Penerima Bantuan Iur (PBI)	472.442
	b. Non PBI	203.885
2	Jamkesda	220.000
3	Jamkessos	50.000
Jumlah		946.327
Persentase		97,69%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2016

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan derajad kesehatan masyarakat. Pada tahun 2015, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) program sebagai berikut :

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

3. Program pengembangan data/Informasi/statistik daerah
4. Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
5. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan & Anak
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit
7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
9. Program Keluarga Berencana
10. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
11. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
12. Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
13. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
14. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit
15. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
16. Program peran serta dan kesetaraan genger dalam pembangunan
17. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
18. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
19. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
20. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
21. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
22. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
23. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
24. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
25. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
26. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
27. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
28. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
29. Program Pengawasan Obat dan Makanan
30. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
31. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit
32. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
33. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
34. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
35. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
36. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
37. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
38. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Permasalahan :

a. Terjadi pergeseran penyebab kematian, dari penyebab langsung kehamilan dan persalinan seperti perdarahan ke penyebab tidak langsung, yaitu penyakit penyerta dan penyulit pada ibu seperti penyakit paru dan emboli air ketuban. Kondisi ini menjadi faktor penyulit selama kehamilan, persalinan, dan pemicu kegawatdaruratan persalinan, meskipun penanganan sudah optimal tetapi akhirnya tetap tidak terselamatkan.

b. Penyebab kematian bayi karena kasus neonatal dengan komplikasi yang sulit ditangani yaitu kasus kelainan kongenital berat dan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Kasus janin dengan kelainan kongenital secara medis sulit dilakukan intervensi. Kasus BBLR juga merupakan kasus yang memerlukan penanganan khusus dan hasilnya belum maksimal.

Solusi :

a. Peningkatan kegiatan pendampingan yang terfokus pada ibu hamil dengan penyakit penyerta maupun penyulit kehamilan. Perlu dibentuk kelas ibu di Puskesmas untuk menjamin kontinyuitas edukasi dan pemeriksaan oleh dokter spesialis *obsgin* di Puskesmas. Mengembangkan edukasi perawatan kehamilan melalui media sosial yang memudahkan untuk diakses oleh ibu hamil secara kontinyu melalui SMSbunda kirim ke 08118469468. Ibu akan memperoleh informasi dan tips kesehatan bagi ibu hamil sampai anak berusia 2 tahun.

b. Pemetaan kasus dan faktor risiko serta skrining penyakit ibu sebelum kehamilan. Peningkatan *Antenatal Care* (ANC) terpadu didukung kelas ibu hamil untuk menjaga kontinyuitas konseling, edukasi dan informasi bagi ibu hamil.

Gambar III.20 Perawatan Kolaborasi Ibu Hamil Beresiko (Wakol Buhares) di Puskesmas Kasihan I Bantul

Melihat hal tersebut di atas, terutama terhadap permasalahan Angka Kematian Bayi yang tidak mencapai target, perencanaan program di tahun yang akan datang lebih difokuskan kepada kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan pengenalan dan kewaspadaan dini masyarakat terhadap tanda bahaya serta risiko. Selain itu juga dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal *teamwork* yang solid serta *response time* yang cepat dalam hal pengenalan risiko, penegakan diagnosa dan ketepatan dalam pengambilan keputusan klinik untuk menghindari keterlambatan tindakan dan kesalahan intervensi sehingga kematian ibu dapat dicegah dan diturunkan.

5. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan ditegaskan dalam RPJMD Tahun 2011-2015 dalam misi 2 "Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia,dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".

Tabel III.11 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD (2015)	Capaian s/d 2015 terhadap 2015 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Angka melek huruf (%)	92,81	93	97,51	104,85	93	104,85
2.	Rata-rata lama sekolah (tahun)	8,72	9,2	8,74	95	9,2	95

Sumber : BPS, 2016

1. Angka Melek Huruf

   Target penuntasan buta aksara merupakan bagian dari fokus pembangunan untuk peningkatan *human capital*, mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara, maupun karena daya ungkit pendidikan terhadap tujuan pembangunan yang lain seperti pembangunan dan pemerataan ekonomi dan sosial.

   Menurut BPS, Angka Melek Huruf yang keluar pada tahun 2015 merupakan angka melek huruf tahun 2014. Realisasi angka melek huruf telah menunjukkan hasil positif, sebagaimana tabel di atas. Realisasi kinerja tersebut menunjukkan bahwa angka melek huruf telah melebihi target yang ditetapkan, dengan pencapaian 97,51% dari target 93% atau sebanyak 104,85%. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang **Sangat Tinggi**. sedangkan dilihat dari target kinerja akhir RPJMD tahun 2015 telah mencapai sebesar 104,85%.

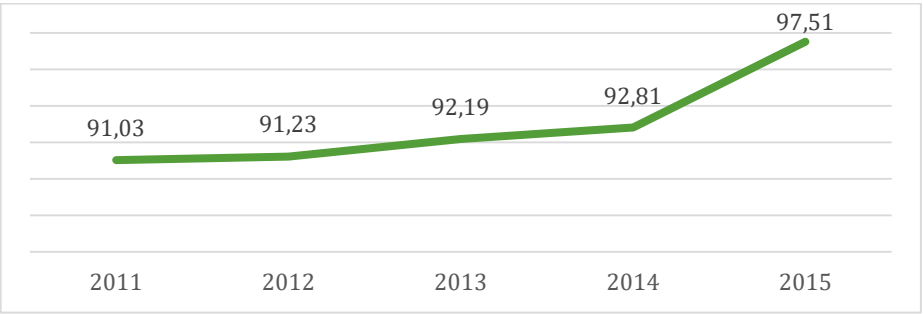

Sumber : BPS, 2016

Gambar III.21 *Trend* Angka Melek Huruf Tahun 2011 - 2015

Trend angka melek huruf mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 2011 sebesar 91,03%, tahun 2012 sebesar 91,23 % meningkat menjadi 92,19 pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 92,81, dan tahun 2015 menjadi 97,51%. Jika dibandingkan dengan Angka Melek Huruf penduduk Kabupaten/Kota di wilayah DIY, dapat dilihat sebagai berikut :

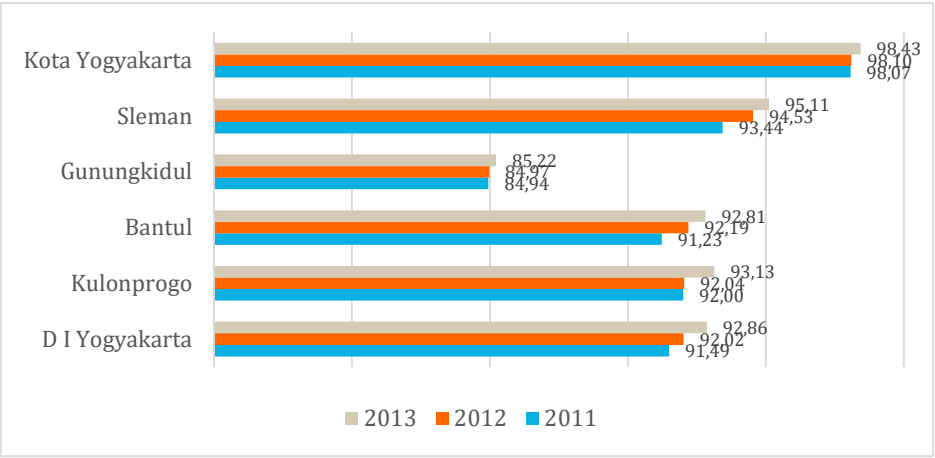

Sumber : BPS, 2016

Gambar III.22 Angka Melek Huruf Penduduk Kabupaten/Kota di Wilayah DIY Tahun 2011 – 2013

Kondisi pencapaian angka melek huruf yang positif menunjukkan hasil dari program/ kegiatan yang telah dilakukan, yang menggambarkan bukan hanya peran dari pemerintah. Capaian ini juga menunjukkan kontribusi penting dari pihak non pemerintah seperti swasta dan organisasi masyarakat yang juga menjadi penyelenggara pendidikan di berbagai jenjang.

Gambar III.23 Membaca di Taman Bacaan Masyarakat

Hal yang juga mendukung ketersediaan dan perbaikan yang dicapai dalam upaya peningkatan angka melek huruf Kabupaten Bantul salah satunya adalah perpustakaan. Selain Kantor Perpustakaan Umum, juga diadakan layanan perpustakaan keliling. Layanan perpustakaan keliling mencakup 17 kecamatan dan 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul. Selain perpustakaan, terdapat 26 Taman Bacaan Masyarakat juga memberikan dukungan terhadap peningkatan angka melek huruf.

2. Rata-rata lama sekolah

   Seperti juga angka melek huruf, komponen penting dari pembangunan pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Angka rata–rata lama sekolah adalah rata–rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

   Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk indikator kinerja ini menunjukkan bahwa capaian kinerjanya **Sangat Tinggi**, karena mencapai 95% dari target yang telah dirumuskan. Menurut BPS, angka Rata-rata lama sekolah yang keluar pada tahun 2015 merupakan rata-rata lama sekolah tahun 2014. Pencapaian rata-rata lama sekolah adalah 8,74 tahun dibandingkan dengan target sebesar 9,2 tahun. Pencapaian ini telah mencapai 95% dari rencana target kinerja pada akhir RPJMD tahun 2015 yaitu sebesar 9,2 tahun.

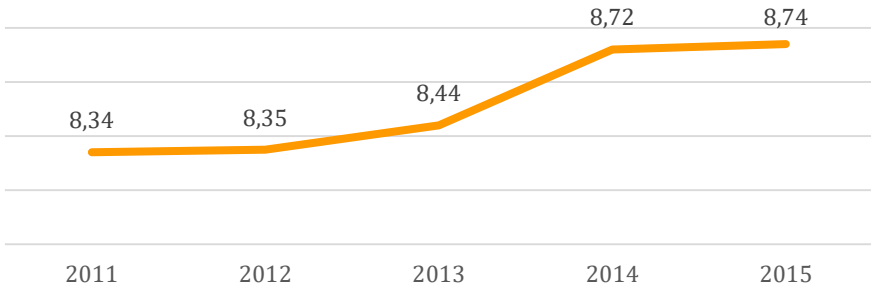

Sumber : BPS, 2016

Gambar III.24 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2011-2015

Angka rata–rata lama sekolah dari kurun waktu 2011 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan dari 8,34 tahun di tahun 2011 menjadi 8,74 tahun di tahun 2015.

Gambar III.25 Orkestra SMKN 2 Kasihan Bantul

Angka rata-rata lama sekolah di seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan, walaupun terjadi stagnasi pada tahun 2011 dan tahun 2012 pada Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Perkembangan rata-rata lama sekolah di kabupaten/kota di DIY dilihat dalam gambar sebagai berikut :

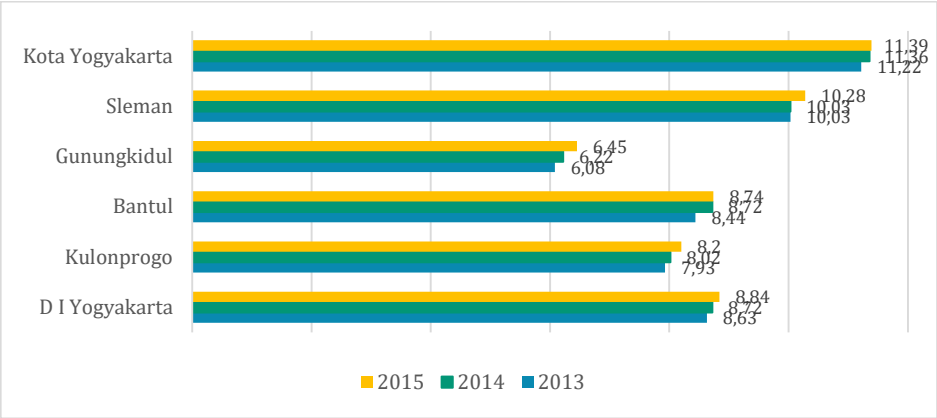

Sumber : BPS, 2016

Gambar III.26 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota se DIY Tahun 2013 – 2015

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait meningkatnya kualitas pendidikan. Pada tahun 2015, sebanyak 10 (sepuluh) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Pendidikan Non Formal
3. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
7. Program Pendidikan Menengah
8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
9. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Permasalahan :

1. Mayoritas penduduk yang masih buta huruf adalah penduduk berusia lanjut.
2. Kesulitan ekonomi masyarakat yang mendorong anak usia sekolah menengah memasuki dunia kerja.

Solusi :

1. Memfokuskan program pengentasan buta huruf pada kelompok lansia.
2. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat miskin, misalnya pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS).
3. Pengembangan gerakan rintisan wajib belajar 12 tahun.
4. Peningkatan bantuan biaya operasional pendidikan.

5. Pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, yang bebas pungutan.

Kedepan akan terus dilakukan koordinasi secara intensif baik dengan pemerintah maupun swasta guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bantul.

6. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemerataan Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan menjadi salah satu penanda keberhasilan pembangunan terutama dari aspek ekonomi. Walaupun pendekatan pembangunan telah mengalami perkembangan yang lebih melihat pentingnya pengembangan kapabilitas manusia, namun aspek ekonomi – yang diwakili antara lain oleh pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan – tetaplah menjadi bagian kunci dalam pembangunan itu sendiri.

Pemerataan pendapatan secara umum menggambarkan sejauhmana manfaat dari hasil pembangunan telah dirasakan oleh masyarakat. Melalui indikator tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Namun demikian, penting untuk diperhatikan, bahwa sebagaimana halnya banyak capaian pembangunan, pemerataan pendapatan juga bukan hanya merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Peran dari pihak non negara, seperti swasta dan masyarakat adalah pilar kunci yang menyumbang pada capaian pemerataan pendapatan.

Tabel III.12 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemerataan Pendapatan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD (2015)	Capaian s/d 2015 terhadap 2015 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,15	5,88	5,1	86,73	5,88	86,73
2.	Indeks Gini	0,3205	0,2281	0,3177	60,72	0,2281	60,72

Sumber : BPS, 2016

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan merupakan pelaksanaan dari Misi 3 "Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang *responsive* gender".

1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan Ekonomi ditargetkan naik dari tahun 2014 sebesar 5,74% menjadi 5,88% pada tahun 2015. Realisasi pencapaian sebesar 5,1% atau sebanyak 86,73% dari target yang direncanakan. Ini menunjukkan capaian kinerja **Tinggi** untuk tahun 2015. Selain itu, jika disandingkan dengan target RPJMD, capaian ini telah menyumbang sebanyak 87,24% dari target RPJMD untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,88% pada tahun 2015.

Perekonomian Kabupaten Bantul pada tahun 2015 mampu tumbuh 5,10% dan menghasilkan nilai PDRB atas harga berlaku sebesar Rp19,75 trilyun dan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp15,62 trilyun. Capaian kondisi tersebut sedikit menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2014 yang sebesar 5,15%, yang disebabkan oleh terjadinya perlambatan ekonomi baik pada skala nasional maupun regional. Meskipun demikian, capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul pada tahun 2015 masih berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,79% dan DIY sebesar 4,94% serta memberikan kontribusi terhadap stabilitas pencapaian pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 5% dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

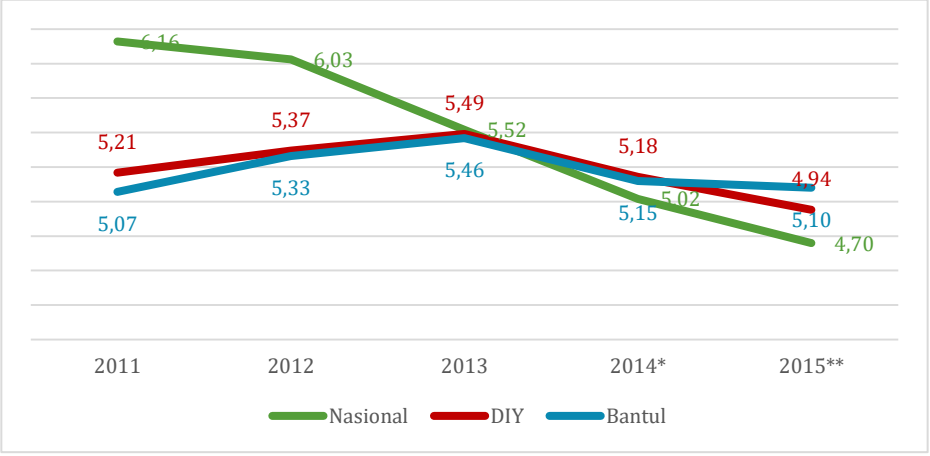

Sumber : BPS, 2016

Gambar III.27 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2011 – 2015

Sebagian besar sektor mengalami pertumbuhan positif namun sebagian lainnya mengalami perlambatan. Sumber utama pertumbuhan ekonomi tahun 2015 di Kabupaten Bantul terutama didukung oleh kinerja pada sektor konstruksi, jasa perusahaan, komunikasi, *real estate*, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa pendidikan, perdagangan besar dan eceran dan jasa jasa yang mengalami laju pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun 2014. Adapun sektor, industri

pengolahan sebagai penyumbang terbesar kedua dalam aktivitas perekonomian Kabupaten Bantul mengalami perlambatan laju pertumbuhan. Nilai tambah dari sektor ini dalam menyumbang perekonomian Kabupaten Bantul tidak sebaik tahun sebelumnya, sebagaimana pada tabel pada lampiran III.

Kemudian bila dilihat dari sisi kontribusi sektoral, perekonomian Kabupaten Bantul pada tahun 2015 belum mengalami perubahan dan masih didominasi oleh sektor-sektor utama yaitu sektor pertanian; industri pengolahan; penyediaan akomodasi dan makan minum; serta sektor konstruksi. Adapun besaran kontribusi dalam penyusun perekonomian yaitu sektor pertanian sebesar 15,44%; industri pengolahan sebesar 14,97%; penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,71%; serta sektor konstruksi sebesar 10,10%.

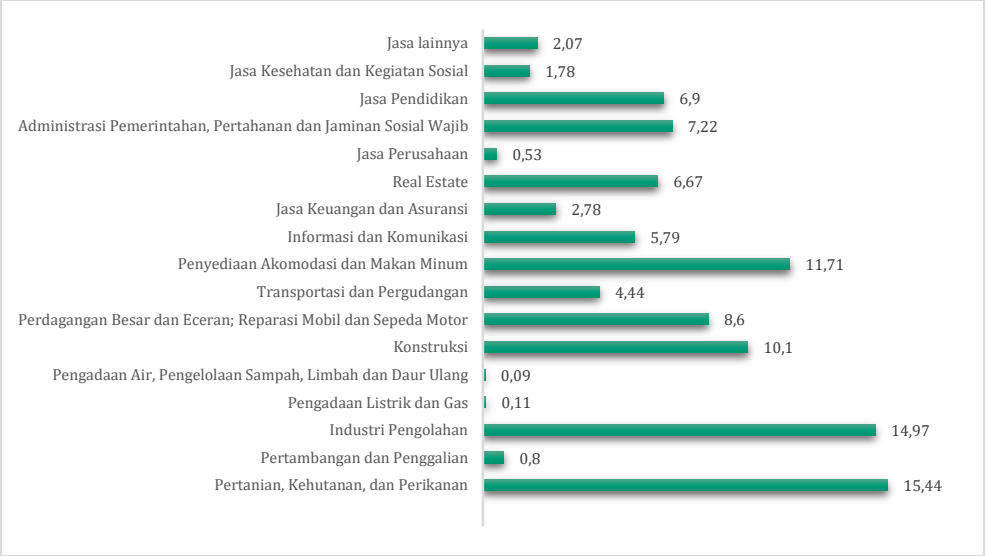

Gambar III.28 Peranan Sektor Ekonomi Penyusun PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2015

Kondisi ekonomi Kabupaten Bantul pada tahun 2015 dari sisi transformasi struktural yaitu pergeseran struktur ekonomi yang ditandai dengan pergeseran peranan lapangan usaha pada tiga sektor tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketiga sektor tersebut adalah yang pertama, sektor primer yang terdiri dari lapangan usaha (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan dan (2) pertambangan dan penggalian. Kedua, sektor sekunder yang terdiri dari lapangan usaha (1) industri pengolahan; (2) pengadaan listrik dan gas; (3) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan (4) konstruksi. Ketiga, sektor tersier yang terdiri dari lapangan usaha (1) perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; (2) transportasi dan pergudangan; (3) penyediaan akomodasi dan makan minum; (4) informasi dan

komunikasi; (5) jasa keuangan; (6) *real estate*; (7) jasa perusahaan; (8) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; (9) jasa pendidikan; (10) jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan (11) jasa lainnya.

2. Indeks Gini

Salah satu indikator yang menjadi penanda ketimpangan pendapatan adalah indeks gini. Besarnya Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin tidak merata.

Penurunan ketimpangan pendapatan yang berhasil dicapai tahun 2015 mencapai 60,72% dari target, atau memiliki capaian kinerja **Rendah**. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini telah mencapai 60,72% dari target indeks ketimpangan pendapatan sebesar 0,2281.

Indeks Gini di LKj Tahun 2014 tercapai 0,2441 sesuai dengan angka sementara BPS, selanjutnya setelah digunakan instrumen pengukuran variabel sektoral yang berubah, *trend* capaian Indeks Gini dari tahun 2011 – 2015 sebagai berikut :

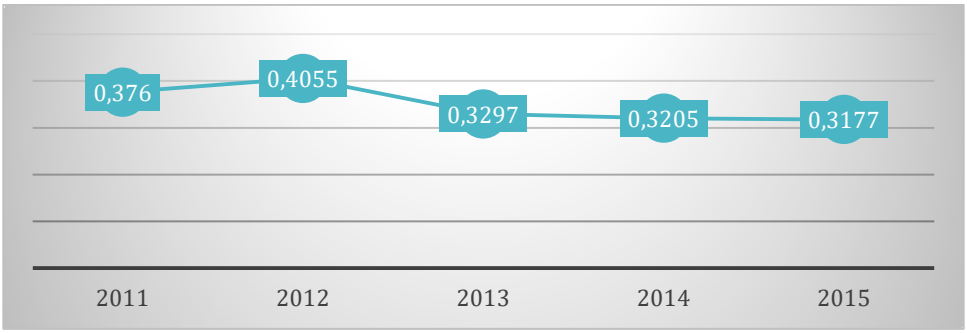

Sumber : BPS, 2016

Gambar III.29 Perkembangan Indeks Gini Tahun 2011 – 2015

Indeks gini senilai 0,3 termasuk kondisi sedang. Pada kondisi ekonomi sekarang sangat mustahil mencapai 0,2. Bantul masih lebih baik daripada DIY (0,41).

Trend indeks gini dari tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Indeks gini mengalami kenaikan dari tahun 2011 ke tahun 2012, hal ini berari ketimpangan pendapatan semakin tinggi atau distribusi pendapatan semakin tidak merata.

Indeks Gini pada tahun 2014 sebesar 0,3205 dan pada tahun 2015, dengan faktor perkalian baru yang ditentukan oleh BPS Pusat, diprediksikan sebesar 0,3177. Indeks Gini tahun 2015 mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat semakin merata.

Hal ini mencerminkan kondisi perekonomian Kabupaten Bantul relatif lebih baik dibandingkan pada tahun 2014 meskipun terdapat beberapa peristiwa dan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat secara umum. Namun demikian hal tersebut masih dalam batas kewajaran, sehingga tetap memberikan implikasi terhadap menurunnya jumlah penduduk berpendapatan rendah dan ketimpangan pendapatan antara penduduk berpendapatan tinggi dan penduduk berpendapatan rendah.

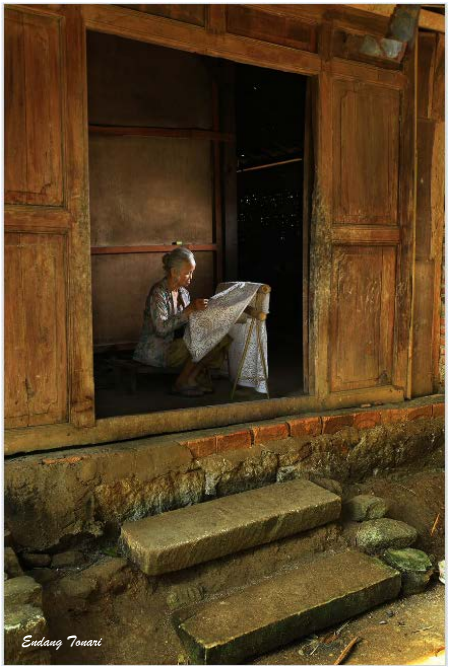

Gambar III.30 Aktifitas membatik di Giriloyo, Imogiri, Bantul

Permasalahan pada sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan adalah kondisi perekonomian yang mengalami perlambatan dikarenakan pengaruh ekonomi dunia. Sedangkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan peningkatan daya saing daerah, melalui penguatan produk lokal daerah; percepatan dan pemerataan investasi daerah serta peningkatan infrastruktur.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan. Pada tahun 2015, sebanyak 21 (dua puluh satu) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu :

1. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
4. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sos
5. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif

6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
7. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
9. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
11. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
12. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
13. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
14. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
15. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
16. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
17. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
18. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
19. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
20. Program Perencanaan Tata Ruang
21. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kemudian upaya menjawab persoalan ketimpangan pendapatan juga didorong oleh pengembangan skema keluarga sejahtera. Tahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2014 sebagai berikut :

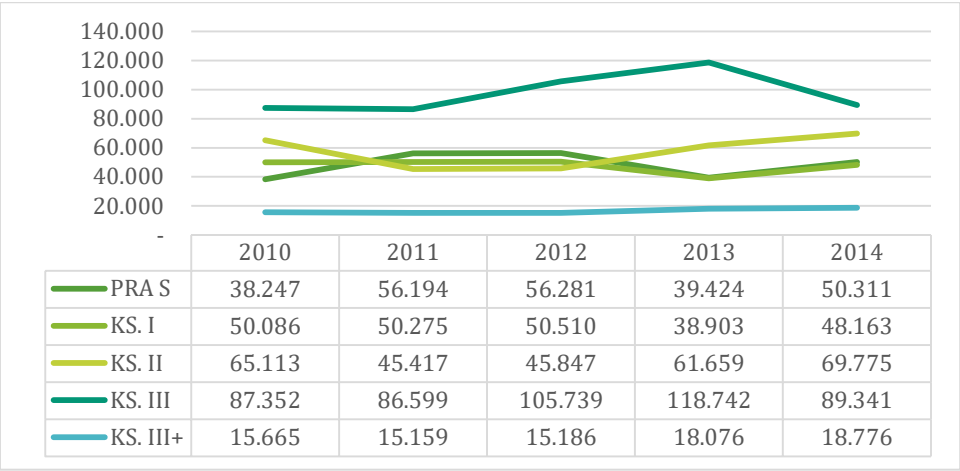

	2010	2011	2012	2013	2014
PRA S	38.247	56.194	56.281	39.424	50.311
KS. I	50.086	50.275	50.510	38.903	48.163
KS. II	65.113	45.417	45.847	61.659	69.775
KS. III	87.352	86.599	105.739	118.742	89.341
KS. III+	15.665	15.159	15.186	18.076	18.776

Gambar III.31 *Trend* Keluarga Sejahtera Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2014

Tahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2014 menunjukkan bahwa jumlah KK pada KS III adalah yang paling dominan. Hal ini berarti bahwa tingkat kesejahteraan keluarga di Kab. Bantul cukup menggembirakan. Keadaan ini mencapai puncaknya pada tahun 2013 namun menurun pada tahun 2014 yang dipengaruhi oleh

kondisi perekonomian yang kurang menggembirakan. Pra Sejahtera mengalami kenaikan kemudian menurun pada tahun 2013 dan tahun 2014, sedangkan Keluarga Sejahtera I cenderung mengalami penurunan. Namun kondisi ini juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah Keluarga Sejahtera III. Dengan kata lain, upaya yang berfokus pada mereka yang berada pada garis terbawah (Pra sejahtera dan KSI) perlu terus dilanjutkan ke depan. Beberapa program yang tengah digalakkan dalam menanggulangi kemiskinan antara lain :

a. menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, hal ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras;
b. mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin dengan penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro;
c. menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat;
d. meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan
e. membangun serta menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

7. Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Sasaran meningkatnya ketahanan pangan daerah merupakan pelaksanaan dari Misi 3 "Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat yang *renponsive* gender".

Tabel III.13 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD (2015)	Capaian s/d 2015 terhadap 2015 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Tingkat Ketersediaan Energi	139,28	140,91	142,88	101,4	140,91	101,4
2.	Tingkat Ketersediaan Protein	133,88	136,21	136,49	100,21	136,21	100,21

Sumber : BKPPP, 2016, data diolah

1. Tingkat Ketersediaan Energi

   Tingkat ketersediaan energi menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2015 capaian kinerjanya tercapai 101,4% dari target yang telah ditetapkan atau masuk dalam kriteria **Sangat Tinggi**. Dari target 140,91%, realisasi tahun 2015 menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan energi telah mencapai 142,88%. Pencapaian ini telah menyumbangkan sebesar 101,4% dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2015, yang dapat diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 maka telah terjadi peningkatan ketersediaan energi sebesar 3,6%. Dengan Angka Kecukupan energi sebesar 3.072 Kkal/Kap/hr maka capaian ini sudah diatas standar Nasional (2.200 Kkal/Kap/hr).

2. Tingkat Ketersediaan Protein

   Tingkat ketersediaana protein menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2015 capaian kinerjanya tercapai 100,21% dari target yang telah ditetapkan, masuk dalam kriteria kinerja **Sangat Tinggi**. Dari target 136,21%, realisasi tahun 2015 menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan energi mencapai 136,49%. Pencapaian ini telah menyumbangkan sebesar 100,21% dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2015, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD. Angka Kecukupan Protein sebesar 77,80 Gr/Kap/hr maka capaian ini sudah diatas standar Nasional (57 Gr/Kap/hr).

Gambar III.32 Peluncuran mi kering "SRIOCA",
produk dari Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)

Sejalan dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Instruksi Bupati Bantul Nomor

03 tahun 2012 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dan Instruksi Bupati Bantul 04 tahun 2012 Penyajian Hidangan pada Pertemuan/Rapat dengan Bahan Pangan Lokal, serta dalam rangka mendukung pemenuhan ketercukupan energi dan protein serta mendorong inovasi, ketrampilan dan kreatifitas masyarakat agar mampu menciptakan produk berciri khas daerah yang unik, berkualitas dan elegan sehingga dapat bersaing dengan produk luar, Kabupaten Bantul menyelenggarakan berbagai lomba.

Lomba yang diadakan antara lain : Lomba Olahan Pangan Lokal, Lomba Tumpeng Triguna Non Beras, dan Lomba Kudapan PMT-AS untuk anak TK yang diikuti perwakilan dari 17 kecamatan di Kabupaten Bantul. Lomba ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Lomba yang rutin diadakan ini untuk mendorong dan meningkatkan kreativitas masyarakat pada umumnya dan ibu rumah tangga khususnya dalam memilih, menentukan, menyusun dan menciptakan menu B2SA yang berbasis sumber daya lokal dengan pangan sumber karbohidrat selain beras dan terigu sehingga dapat membangun budaya keluarga dan masyarakat untuk mengkonsumsi aneka menu makanan khas daerah sesuai prinsip B2SA, antara lain melalui pemanfaatan pekarangan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait meningkatnya ketahanan pangan daerah. Pada tahun 2015, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu :

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
6. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
7. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
8. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
9. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
10. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
11. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
12. Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan
13. Program Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan
14. Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan
15. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Permasalahan :

1. Sumber daya manusia bidang pertanian masih didominasi oleh petani yang berusia tua.
2. Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
3. Adanya alih fungsi lahan pertania untuk perumahan.

Solusi :

1. Melaksanakan program penyuluh menyentuh, khususnya pengenalan sedini mungkin kepada anak-anak untuk mencintai pertanian, perikanan dan peternakan agar mereka tertarik terjun dan menggeluti dunia pertanian.
2. Pemanfaatan pekarangan melalui budidaya tanaman pangan, ternak dan perikanan dalam berbagai kegiatan.
3. Moratorium alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan dan kebijakan pemanfaatan lahan pekarangan.
4. Pemulihan lahan kritis untuk tanaman pangan.

8. Sasaran Meningkatnya Jumlah Pengunjung Objek Wisata

Tabel III.14 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Jumlah Pengunjung Objek Wisata

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD (2015)	Capaian s/d 2015 terhadap 2015 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase peningkatan jumlah wisatawan	6,73	5	8,7	174	5	174

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2016, data diolah

Sasaran meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata mengalami pencapaian kinerja **Sangat Tinggi**. Persentase peningkatan jumlah wisatawan tahun 2015 ditargetkan sebesar 5% terealisir 8,7% atau 174%. Capaian ini menyumbangkan 174% dari target akhir RPJMD tahun 2015.

Tabel III.15 Objek Wisata Kabupaten Bantul Tahun 2011 - 2015

No.	Obyek Wisata	2011	2012	2013	2014	2015	Keterangan
1	Alam	9	9	10	10	20	Pantai, goa, ekosistem bakau, gumuk pasir

No.	Obyek Wisata	2011	2012	2013	2014	2015	Keterangan
2	Buatan	5	5	5	6	53	Taman rekreasi air, kolam renang, taman wisata agro, desa wisata
3	Sejarah, budaya	18	20	21	21	201	Warisan budaya, cagar budaya, desa budaya, wayang, benda purbakala, budaya Jawa, batik, alat tani tradisional, tokoh terkenal, koleksi penghayat kepercayaan
4	Museum	9	9	9	10	10	Dirgantara, wayang, benda purbakala, budaya Jawa, batik, alat tani tradisional, tokoh terkenal, gumuk pasir, koleksi penghayat kepercayaan
5	Desa Wisata	24	24	33	34	36	16 dari 34 desa wisata yang ada sudah sering menerima kunjungan.

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2016

Sejak tahun 2000, Desa Wisata di Kabupaten Bantul telah dibentuk. Sampai saat ini Desa Wisata di Bantul sebagai salah satu pengembangan destinasi wisata baru di Bantul sebanyak 36 desa. Sedangkan sarana wisata Kabupaten Bantul sampai tahun 2015 yaitu hotel berbintang empat sebanyak 1 buah, hotel non bintang sebanyak 87 buah dan restoran/rumah makan sebanyak 177 buah.

Gambar III.33 Pelestarian Budaya Jawa

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada tahun 2011 mencapai 1.740.417 orang menjadi 2.500.114 pada tahun 2015. Sedangkan jumlah PAD yang disumbangkan tahun 2011 sebesar Rp.5.289.407.718,00, meningkat menjadi Rp.11.150.632.500,00 pada tahun 2015. Peningkatan tersebut diatas selain didukung oleh keanekaragaman obyek wisata yang meliputi obyek wisata alam, budaya/religius, dan minat khusus/buatan, juga didukung oleh pengembangan desa-desa wisata sebagai *alternative tourism* di Kabupaten Bantul, sehingga dapat memberikan pilihan-pilihan destinasi wisata bagi wisatawan.

Tabel III.16 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata Tahun 2011 – 2015

Tahun	Jumlah Wisatawan (orang)	Jumlah PAD (Rp.)
2011	1.740.417	5.289407.718,00
2012	2.356.578	8.640.795.116,00
2013	2.153.404	9.120.764.368,00
2014	2.298.351	9.767.144.025,00
2015	2.500.114	11.150.632.500,00

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2016

Gambar III.34 Gumuk Pasir Pantai Parangkusumo

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung akselerasi perekonomian Kabupaten Bantul. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor

pariwisata terhadap PAD Kabupaten Bantul yang dalam lima tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Perkembangan dunia kepariwisataan Kabupaten Bantul yang cukup dinamis serta berkesinambungan diharapkan dapat memberikan peran yang lebih konstruktif dari sektor ini dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Bantul di masa mendatang.

Gambar III.35 Panembahan Senopati

Event budaya yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul meliputi Pagelaran Wayang Kulit, Festival Dalang Cilik, Gelar Seni Budaya Yogyakarta, Gelar Kesenian Luar Daerah, Festival Kesenian Tradisional, Sarasehan Budaya, Festival Sendratari, Gelar Seni Pertunjukan, Parade Tari Nusantara, Festival Langen Carito, Festival Reog dan Jathilan se-DIY, Bentara Upacara Adat se-DIY, Festival Karawitan ibu-ibu se-DIY, Festival Sendratari se-DIY, Festival Ketoprak se-DIY, Festival Dalang se-DIY, Festival Keroncong se-DIY, Festival Budaya se-DIY, Festival Desa Budaya se-DIY serta Festival Tari dan Seni Pertunjukan se-DIY. Event-event budaya ini juga didukung oleh Danais dari Pemerintah DIY.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata. Pada tahun 2015, sebanyak 9 (sembilan) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu :

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
3. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
7. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
8. Program Perencanaan Tata Ruang
9. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Permasalahan :

1. Belum optimalnya perwujudan Sapta Pesona dan sadar wisata di setiap obyek wisata.
2. Belum lengkapnya produk perencanaan pengembangan kepariwisataan daerah.

Solusi :

1. Peningkatan kapasitas SDM dan lembaga pengelola dalam menangani setiap permasalahan di obyek wisata dan pelaksanaan kampanye Sadar Wisata secara kontinyu dengan memanfaatkan semua media;
2. Penyusunan RDKP untuk 17 kecamatan dan RTOW untuk setiap obyek wisata sebagai penjabaran RIPPARDA Kabupaten Bantul.

9. Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran

Masalah yang dihadapi Kabupaten Bantul adalah masih besarnya jumlah penduduk miskin dan masalah pengangguran. Peluang kesempatan kerja yang ada tidak sebanding dengan peningkatan angkatan kerja. Pembangunan ketenagakerjaan, yang merupakan bagian dari pembangunan daerah, bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan harapan jumlah penganggur dan setengah penganggur dapat ditekan atau diperkecil.

Tabel III.17 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD (2015)	Capaian s/d 2015 terhadap 2015 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Angka pengangguran	4,3	4,7	4,1	112,77	4,7	112,77

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2016

Menurunnya tingkat pengangguran tahun 2015 capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang **Sangat Tinggi**, dari target 4,7 terealisir 4,1 atau tercapai 112,77%. Capaian ini juga menyumbangkan sebanyak 112,77% dari target akhir RPJMD tahun 2015.

Berbagai kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pada kenyataannya memperoleh animo dan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Kenyataan yang ada selama ini, jumlah angkatan kerja di Bantul cukup besar sementara di sisi lain penciptaan lapangan kerja masih terbatas sehingga masalah

pengangguran selalu ada dari tahun ke tahun. Berikut kami sajikan data angkatan kerja tahun 2015 :

Tabel III.18 Angkatan Kerja Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kasihan	36.707	33.121	69.828
2	Sewon	24.883	19.946	44.829
3	Banguntapan	35.265	32.250	67.515
4	Bantul	17.336	15.714	33.050
5	Pajangan	9.899	9.635	19.534
6	Sedayu	16.822	12.548	29.370
7	Pandak	15.667	15.146	30.813
8	Srandakan	8.907	8.411	17.318
9	Sanden	9.249	8.008	17.257
10	Bambanglipuro	11.401	12.301	23.702
11	Pundong	11.087	10.889	21.976
12	Kretek	8.771	9.018	17.789
13	Jetis	15.298	12.500	27.798
14	Imogiri	21.907	22.423	44.330
15	Dlingo	15.825	15.663	31.488
16	Pleret	15.312	14.647	29.959
17	Piyungan	11.647	11.880	23.527
Jumlah		**285.983**	**264.100**	**550.083**

Sedangkan trend jumlah angkatan kerja tahun 2011 -2015 disajikan sebagai berikut :

Tabel III.19 Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015

No	Kecamatan	2011		2012		2013		2014		2015	
		B	P	B	P	B	P	B	P	B	P
1	Srandakan	17.666	267	19.931	1.853	46.263	1.314	16.112	1.336	15.168	1.299
2	Sanden	16.192	2.497	18.805	2.415	22.534	1.261	15.398	1.082	13.847	1.266
3	Kretek	18.680	615	17.210	1.844	16.339	1.555	15.219	1.284	11.860	1.708
4	Pundong	15.748	386	15.772	362	16.312	509	15.025	979	13.907	3.092
5	Bblipuro	24.685	2.361	22.249	1.674	16.220	1.671	17.058	1.135	20.938	985
6	Pandak	29.471	1.984	32.500	870	29.472	1.345	27.087	911	23.807	1.097
7	Bantul	32.396	4.286	36.841	3.804	34.669	4.437	27.624	1.890	28.300	1.378
8	Jetis	25.064	2.007	25.090	1.793	25.452	1.472	27.195	2.696	24.411	1.094
9	Imogiri	36.198	1.466	34.444	1.335	36.688	1.356	35.836	1.161	38.977	1.032
10	Dlingo	22.948	1.176	28.759	865	27.100	1.016	26.173	759	28.000	65
11	Pleret	25.410	2.886	29.540	2.072	29.625	2.067	22.678	1.068	23.763	909
12	Piyungan	20.514	588	27.371	3.051	23.278	585	21.987	1.323	19.287	879
13	Bguntapan	51.992	1.432	55.192	958	56.659	1.749	57.955	1.320	60.427	2.401
14	Sewon	43.828	2.645	43.456	1.309	49.374	2.040	42.106	2.187	39.457	2.024
15	Kasihan	47.709	2.801	46.237	2.463	46.263	2.456	45.109	1.473	49.867	1.253

No	Kecamatan	2011		2012		2013		2014		2015	
		B	P	B	P	B	P	B	P	B	P
16	Pajangan	20.809	701	21.091	309	20.080	169	18.117	544	14.689	141
17	Sedayu	27.257	1.121	27.505	098	25.835	1.186	23.422	1.368	22.662	1.300
Jumlah		476.567	29.219	501.993	28.075	496.370	26.188	454.101	22.516	527.530	22.553
Persentase			**5,8**		**5,3**		**5,01**		**4,3**		**4,1**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2016

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa secara proporsional, jumlah penganggur menurun dari 5,8% pada tahun 2011 dan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sampai pada tahun 2015 berada di angka 4,1%. Untuk mengatasi permasalahan pengangguran salah satunya dilaksanakan kegiatan pelatihan.

Gambar III.36 Kegiatan Pelatihan

Permasalahan pengangguran juga tidak dapat dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia atau tingkat pendidikannya. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, jumlah penganggur dari tahun ke tahun didominasi oleh golongan tingkat pendidikan rendah seperti SD, SLTP dan SLTA. Kondisi pendidikan para penganggur selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.20 Jumlah Penganggur Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015

No.	Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Tidak tamat SD	6.273	4.651	4.777	3.924	3.958
2	SD	6.486	6.316	5.309	4.800	4.491
3	SLTP	6.499	6.734	5.692	5.551	5.175
4	SLTA	6.485	6.670	5.571	5.750	6.114
5	Akademi	1.987	2.117	2.771	1.494	1.575

6	S1/S2	1.489	1.587	2.068	997	1.240
Jumlah		**29.219**	**28.075**	**26.188**	**22.516**	**22.553**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2016

Dalam rangka memenuhi hak pekerja ditetapkan UMK yang dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan hidup yang semakin meningkat pula, sebagai berikut :

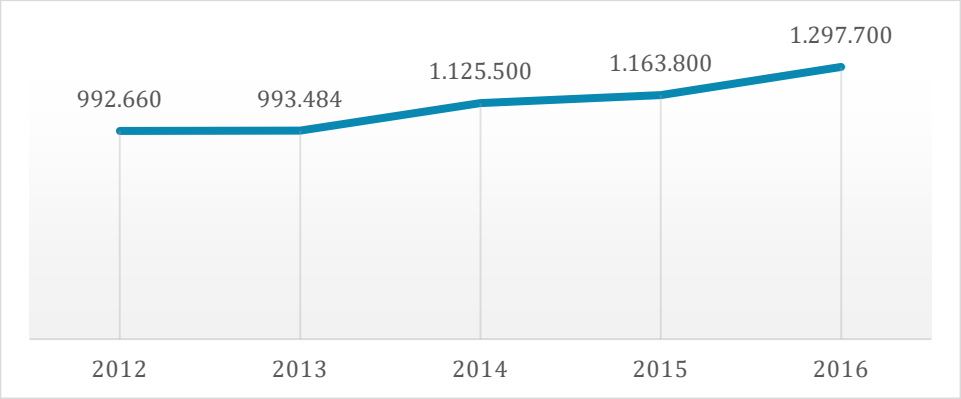

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2016

Gambar III.37 Perkembangan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2012 - 2016

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait menurunnya tingkat pengangguran. Pada tahun 2015, sebanyak 8 (delapan) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari :

1. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
5. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
6. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
7. Program Perluasan Kerja
8. Program Transmigrasi Regional

Permasalahan :

1. Kesempatan kerja yang ada tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat.
2. Kualitas tenaga kerja tidak memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja.
3. Produktivitas tenaga kerja masih sangat rendah.

Solusi :

1. Meningkatkan iklim investasi.
2. Intensifkan pencarian lowongan pekerjaan melalui *job canvasing* dan informasi pasar kerja melalui bursa kerja *on-line* lebih ditingkatkan.
3. Melaksanakan jenis pelatihan yang dibutuhkan pasar kerja
4. Peningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan mengadakan pelatihan tingkat lanjut serta memperbanyak dan mengintensifkan pelatihan kewirausahaan.

10. Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin

Amanat konstitusi yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea keempat menyatakan bahwa pemerintahan negara Republik Indonesia ini dibentuk untuk: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Implementasi dari ”memajukan kesejahteraan umum ”rakyat Bantul” dilaksanakan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pengentasan kemiskinan, ketenagakerjaan, meningkatkan daya saing berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan sarana dan prasarana publik.

Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas pembangunan sebagai pelaksanaan dari Misi 3, “Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang *responsive gender*”.

Tabel III.21 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD (2015)	Capaian s/d 2015 terhadap 2015 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase jumlah penduduk miskin	15,69	12	15,16	73,67	12	73,67

Sumber : Bappeda, 2016, data diolah

Sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin menunjukkan kinerja **Sedang**. Hal ini dilihat dari pencapaian indikator persentase jumlah penduduk miskin yang mengalami capaian 73,67% dari target yang ditetapkan. Tahun 2015 realisasi

persentase jumlah penduduk miskin sebesar 15,16% dari target sebesar 12%. Capaian ini menyumbangkan sebesar 73,67% dari target RPJD tahun 2015, persentase jumlah penduduk miskin sebesar 12%.

Perlu diketahui bahwa penghitungan angka kemiskinan sebagai target RPJPD dari Tahun 2011-2015 masih menggunakan data kemiskinan Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati No.21.A Tahun 2007 tentang Indikator Keluarga Miskin Kabupaten Bantul. Namun pada tahun 2015, penghitungan angka kemiskinan mengacu pada kriteria Pemerintah Pusat sebagai tindaklanjut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dengan demikian, khusus tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Bantul tidak lagi melaksanakan pendataan kemiskinan tetapi menggunakan data kemiskinan dari Pemerintah Pusat hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dilaksanakan BPS pada tahun 2015.

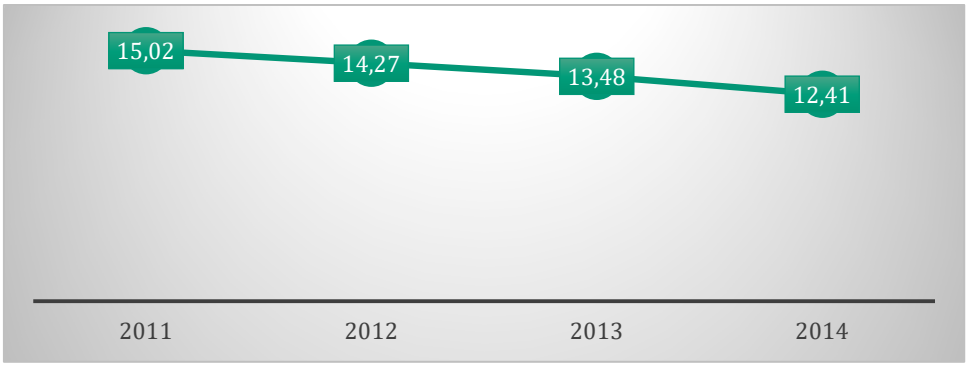

Gambar III.38 *Trend* Persentase Penduduk Miskin Tahun 2011 – 2015 versi Pemerintah Kabupaten Bantul

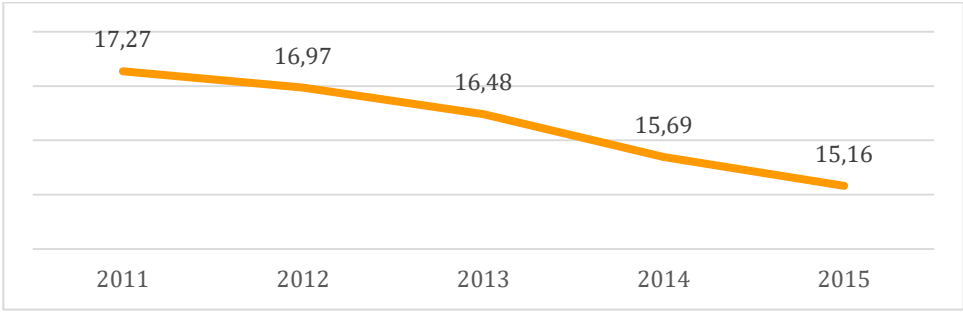

Gambar III.39 *Trend* Persentase Penduduk Miskin Tahun 2011 – 2015 versi Pemerintah Pusat

Terlihat pada ke dua tabel diatas bahwa selama lima tahun terakhir persentase kemiskinan dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Adapun data tentang jumlah penduduk miskin terakhir, yaitu pada tahun 2014 menurut Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebesar 113.863 jiwa, menurun sebesar 8.158 jiwa atau

1,07% dari tahun 2013 sebesar 122.021 jiwa. Sedangkan berdasarkan data dari pemerintah Pusat jumlah penduduk miskin sebanyak 153.910 orang, menurun sejumlah 2.590 orang dari 156.500 jiwa pada tahun 2013 menjadi 153.910 jiwa pada tahun 2014 atau menurun sebesar 1,65%.

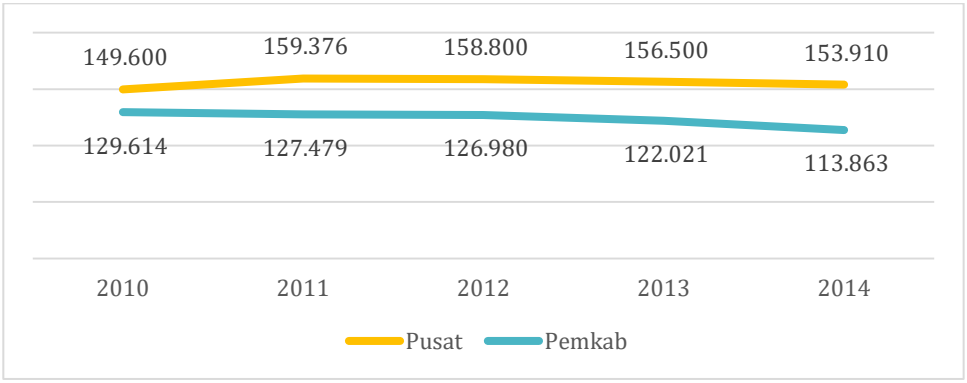

Gambar III.40 Perkembangan Jumlah Jiwa Miskin Tahun 2011 -2014

Di lihat dari sebarannya, persentase penduduk miskin di kawasan perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di kawasan pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk miskin masih berada di wilayah perdesaan. Hal ini bisa dipahami karena penduduk perdesaan memiliki akses layanan publik yang lebih rendah, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan mayoritas penduduk yang bekerja di sektor pertanian di mana nilai produk pertanian telah semakin menurun. Karenanya, penduduk perdesaan memiliki pendapatan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan penduduk perkotaan

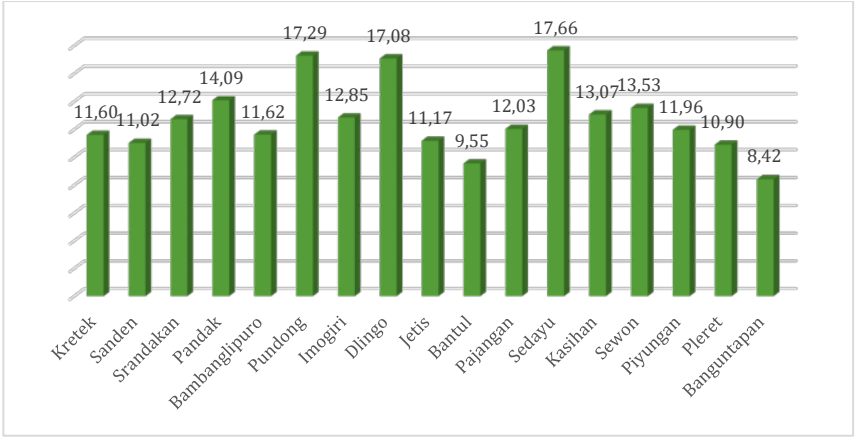

Sumber : TN2PK, 2015

Gambar III.41 Persentase Jiwa Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2014

Program kegiatan penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun telah menunjukan hasil yang cukup baik, hal ini tercermin dari semakin berkurangnya jumlah jiwa miskin. Sejak tahun 2013, telah dikembangkan program dalam penanganan kemiskinan yaitu One Village One Product (OVOP) atau satu wilayah menghasilkan satu macam produk kerajinan andalan. Dari berkembangnya potensi wilayah tersebut, masyarakat dapat mengoptimalkan hasil kerajinannya selain sebagai ciri khas produk dari wilayahnya, hasil kerajinan ini juga dapat meningkatkan kesejahteraannya serta mengentaskan kemiskinan. Program OVOP ini di Bantul dinamakan Produk Andalan Setempat (PAS).

Dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul, angka kemiskinan tertinggi ada pada kecamatan Banguntapan, Kasihan, Sewon dan Imogiri. Berdasarkan data dari TNP2K, kecamatan yang mempunyai angka kemiskinan tertinggi yaitu kecamatan Sedayu, Pundong dan Dlingo. Adanya perbedaan ini dikarenakan perbedaan indikator yang berbeda dalam penentuan kriteria miskin.

Gambar III.42 Aktivitas Masyarakat

Permasalahan :

1. Kurang optimalnya sinergitas program penanggulangan kemiskinan
2. Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensinya untuk meningkatkan pendapatan dan mengatasi masalah kemiskinannya.
3. Kualitas dan kuantitas sarana prasarana produksi usaha ekonomi masyarakat miskin yang kurang memadai.

Solusi :

1. Optimalisasi fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan

2. Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang berbasis wilayah dan ekonomi lokal.
3. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan memanfaatkan potensi lokal.
4. Pembangunan infrastruktur untuk mendorong akses terhadap layanan publik dan pasar yang lebih baik bagi masyarakat di kawasan pedesaan. Dengan cara ini, upaya menjawab tingginya persentase penduduk miskin di kawasan pedesaan bisa di lakukan dengan lebih efektif dengan manfaat berupa peningkatan pendapatan masyarakat

Guna mengatasi kemiskinan di Kabupaten Bantul, terus diupayakan kebijakan yang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, membangun perilaku, serta pengorganisasian masyarakat sebagai berikut :

a. Penggalakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka penurunan kemiskinan di Kabupaten Bantul.
b. Meningkatkan kinerja lembaga TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) sampai ditingkat kecamatan, desa dan pedukuhan, program pemberdayaan masyarakat, pengurangan beban KK Miskin, penguatan kelembagaan, serta validasi data keluarga miskin.
c. Mendorong pertumbuhan ekonomi pada kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah dan menyerap banyak tenaga kerja.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin. Pada tahun 2015, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari :

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
3. Program Pembangunan Perumahan
4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Keseja
5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
8. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
9. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
10. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
11. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

12. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
13. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
14. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
15. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

11. Sasaran Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana

Sesuai Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana diartikan sebagai peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Aspek pentingnya adalah bukan hanya penanganan kedaruratan, namun juga pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan

Pemerintah Kabupaten Bantul sudah mengantisipasi timbulnya bencana sesuai dengan sistem manajemen bencana melalui pengembangan regulasi yang memadai, perencanaan dan penganggaran, pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Paradigma penanggulangan bencana sudah dikembangkan dari yang dulu berpola responsif-tanggap darurat menjadi lebih ditekankan pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Di tingkat masyarakat, upaya membangun kesiapsiagaan juga dilakukan dengan mengembangkan desa tangguh, desa siaga bencana dan sekolah siaga bencana. Hal ini menjadi strategi penting untuk memastikan bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan, ketrampilan dan dukungan yang memadai baik untuk mengantisipasi kejadian bencana atau memulihkan kehidupan apabila terjadi bencana.

Tabel III.22 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2014	2015			Target Akhir RPJMD (2015)	Capaian s/d 2015 terhadap 2015 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Desa Tangguh	10,66	13,33	17,33	130,01	13,33	103,01

Sumber : BPBD, 2016

Sasaran meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana tercapai **Sangat Tinggi**. Hal ini dilihat dari indikator persentase desa tangguh yang tercapai 17,33% dari target 13,33% atau nilai capaian 130,01%. Capaian ini menyumbangkan 103,01% dari

target akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 13,33% desa tangguh. Desa tangguh yang terealisir sampai dengan tahun 2015 sebanyak 13 (tiga belas) desa dari 75 (tujuh puluh lima) desa yang ada di Kabupaten Bantul, yaitu Desa Wonolelo, Mulyodadi, Tirtohargo, Gadingharjo, Gadingsari, Poncosari, Srimulyo, Mangunan, Jatimulyo, Wukirsari, Kebonagung, Parangtritis dan Srigading. Sedangkan Sekolah Siaga Bencana sebanyak 4 (empat) sekolah, yaitu SD Parangtritis, SD Ar Raihan, SMP 2 Imogiri dan SMA 1 Kretek.

Upaya merintis desa tangguh bencana dilakukan secara terus menerus dan memperhatikan banyak faktor kesiapan masing-masing desa. Desa tangguh bencana dirintis kerja sama langsung dengan Badan Nasional Penanggulangan Bancana (BNPB), NGO dari Jerman GT Z, dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana yang sewaktu-waktu terjadi. Desa tangguh bencana menuntut kesadaran masyarakat tentang perilaku menyelamatkan keluarga saat terjadi bencana.

Gambar III.43 Rumah Syahrini, Bojong RT.03, Wonolelo, hasil relokasi korban longsor

Wilayah Kabupaten Bantul memiliki potensi rawan bencana alam seperti: rawan banjir, bencana tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan kekeringan. Gempa bumi dahsyat yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 berdampak hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Gelombang air pasang (*rob)* merupakan bencana yang mengikuti bencana gempa bumi tahun 2006 dan terjadi di kawasan pantai selatan Kabupaten Bantul yang meliputi Kecamatan Kretek, Sanden, dan Srandakan. Kekeringan di Kabupaten Bantul hampir terjadi setiap tahun dan terjadi di Kecamatan Dlingo, Piyungan, Pajangan, Pleret, Imogiri, dan Pundong.

Tabel III.23 Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Bantul

No	Jenis Bencana	Lokasi yang Berpotensi
1.	Kawasan rawan gempa bumi	Di seluruh kecamatan
2.	Kawasan rawan longsor	Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, Pundong, Pajangan

No	Jenis Bencana	Lokasi yang Berpotensi
3.	Kawasan rawan banjir	Kretek, Srandakan, Sanden, Pandak, Jetis, Pundong, Pleret, Banguntapan, Kasihan, Bambanglipuro
4.	Kawasan rawan gelombang pasang	Kretek, Srandakan, Sanden,
5.	Kawasan rawan angin ribut	Di seluruh kecamatan
6.	Kawasan rawan kebakaran	Di seluruh kecamatan
7.	Kawasan rawan kekeringan	Dlingo, sebagian Piyungan, sebagian Pajangan, sebagian Pleret, sebagian Imogiri, sebagian Pundong, sebagian Sedayu, sebagian Kasihan, dan sebagian Kretek.

Sumber : BPBD, 2016

Kerawanan bencana bagi masyarakat Bantul terhadap frekuensi kejadian bencana selama tahun 2011 – 2015, terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel III.24 Frekuesi Kejadian Bencana di Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015

No	Jenis Bencana	2011		2012		2013		2014		2015	
		Kejadian	Kasus	Kejadian	Kejadian	Kasus	Kasus	Kejadian	Kasus	Kejadian	Kasus
1	Banjir	3	6	2	0	0	41	5	19	8	43
2	Tanah longsor	12	70	12	13	38	29	19	39	27	49
3	Kebakaran	43	43	67	69	69	67	51	51	105	105
4	Gempa bumi	1	1	0	1	29	0	2	2	3	3
5	Angin ribut	9	194	9	9	185	132	7	118	51	208
6	Gelombang dan abrasi	1	1	0	0	0	0	3	146	0	0
7	Erosi sungai	1	2	0	9	9	0	0	0	16	16
8	Abrasi laut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		**77**	**324**	**116**	**312**	**140**	**377**	**100**	**405**	**202**	**381**

Sumber : BPBD, 2016

Catatan : Kejadian : peristiwa terjadi, Kasus : banyaknya titik terdampak per kejadian

Permasalahan :

1. Masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap potensi ancaman bencana.
2. Beragamnya potensi ancaman bencana di wilayah Kabupaten Bantul

Solusi :

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana.

2. Pengarusutamaan mitigasi bencana yang menjadi program prioritas dalam pengurangan resiko bencana.

Upaya penanggulangan bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa ataupun kerugian yang lebih besar dilakukan dengan penghijauan di kawasan rawan longsor dan sekitar pantai, pembangunan talud, drainase, pembangunan prasarana air bersih, droping air, dan sebagainya. Selain itu, pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan tinggi bencana gempa bumi tidak dibangun untuk permukiman dan fasilitas umum;
b. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan sedang, permukiman haruslah mempunyai struktur bangunan yang kuat, begitu pula sekolah, puskesmas, tempat ibadah dan toko-toko;
c. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan gempa, disiapkan desa tangguh, sekolah siaga bencana, bahkan kantor siaga bencana.
d. Selain itu juga upaya yang dilakukan untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana, yaitu penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan evakuasi, rambu evakuasi, penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras suara di sepanjang pantai dan togor EWS serta peningkatan kualitas SDM tenaga penanggulangan bencana

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait mantapnya penanggulangan bencana. Pada tahun 2015, sebanyak 7 (tujuh) program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini, terdiri dari :

1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
3. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

C. Pencapaian Kinerja Lainnya

1. Pencapaian Target MDGs

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul memiliki komitmen kuat dalam upaya mewujudkan tercapainya target MDGs pada Tahun 2015. Integrasi tujuan-tujuan MDGs tersebut dapat dicermati dalam berbagai program prioritas pembangunan yang terdapat pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Aksi Daerah MDGs disusun sebagai bagian dari upaya mempercepat pencapaian target MDGs selaras dengan amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan.

Pemerintah Kabupaten Bantul menggunakan indikator-indikator sesuai dengan yang telah ditetapkan ditingkat nasional; sementara itu untuk target-target pencapaian disesuaikan dengan target-target yang ditetapkan daerah berdasarkan kondisi yang ada saat ini sebagai *base line* data untuk menentukan target-target capaian baik target pertahun maupun target akhir pencapaian MDGs yaitu tahun 2015. Secara nasional telah tetapkan 8 tujuan yang terbagi dalam 48 indikator target pencapaian MDGs pada tahun 2015 ini. Untuk tujuan dan indikator pencapaian MDGs di level kabupaten, dari ke 8 tujuan pencapaian target MDGs tersebut, Kabupaten Bantul hanya pertanggungjawab terhadap 7 tujuan pencapaian yaitu tujuan 1 (satu) sampai dengan tujuan 7 (tujuh).

Dalam monitoring pencapaian target-target MDGs ini, Kabupaten Bantul menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan secara nasional; demikian halnya dengan uraian indikator kuantitatifnya. Uraian indikator kuantitatif untuk pengukuran pencapaian target MDGs ini juga sudah disediakan oleh Bappenas secara terperinci. Berkaitan dengan indikator ini, untuk Kabupaten Bantul perlu menambahkan indikator kualitatif untuk memperkaya analisis dan mengacu pada pendekatan hak, tidak semata-mata hitungan yang dikuantifikasi indikator pencapaiannya.

Berikut ini matriks indikator capaian yang harus diisi dan digunakan sebagai patokan untuk melakukan monitoring pencapaiannya, disajian pada lampiran IV.

2. Status Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam konsep pembangunan manusia, manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan alat pembangunan. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rayat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menalankan kehidupan yang produktif (*United Nation Development Program – UNDP).* Untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas hidup masusia menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selama lima tahun terakhir, nilai IPM Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang positif yaitu nilai IPM yang terus mengalami peningkatan yakni sebesar 75,31 pada tahun 2011 hingga 77,11 pada tahun 2015.

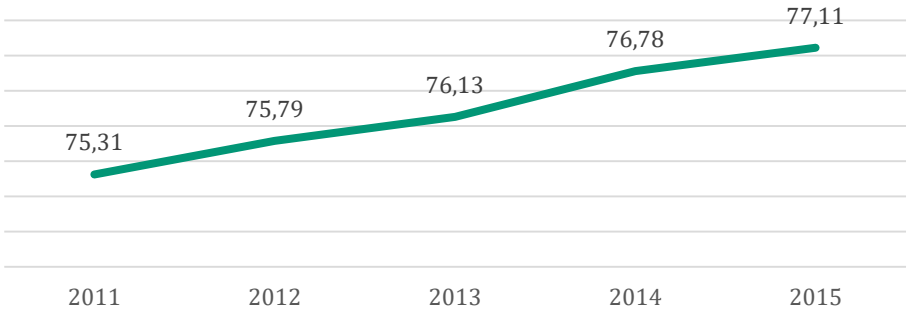

Gambar III.44 Perkembangan IPM Tahun 2011 – 2015

Dalam kurun lima tahun terakhir, nilai IPM Kabupaten Bantul naik sebesar 1,8 poin sedangkan dalam setahun terakhir meningkat sebesar 0,33 poin. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul tahun 2015 lebih tinggi dari DIY (77,10) dan Nasional (69,50)

Tabel III.25 Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Indeks Komponen IPM Kabupaten Bantul Tahun 2013-2015

Indeks	Nilai			Pertumbuhan		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Harapan hidup	81,83	81,88	81,91	0,04	0,06	0,04
Pendidikan	67,44	68,93	69,74	1,28	2,21	1,18
Pengeluaran	79,97	80,20	80,25	0,06	0,29	0,05
IPM	76,13	76,78	77,11	0,45	0,85	0,43

Sumber : BPS, 2016

Jika dilihat dari pertumbuhannya, indeks yang tumbuh paling besar pada tahun 2015 adalah indeks pendidikan yaitu 1,18 persen. Sedangkan indeks harapan hidup dan indeks pengeluaran tumbuh dengan besaran yang hampir sama yaitu 0,04 persen dan 0,05 persen. Hal ini senada dengan tiga tahun terakhir bahwa diantara ketiga komponen tersebut yang tumbuh paling besar adalah indeks pendidikan. Sedangkan untuk pertumbuhan nilai IPM Kabupaten Bantul pada tahun 2015 sebesar 0,43 persen, tumbuh lebih lambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 0,85 persen.

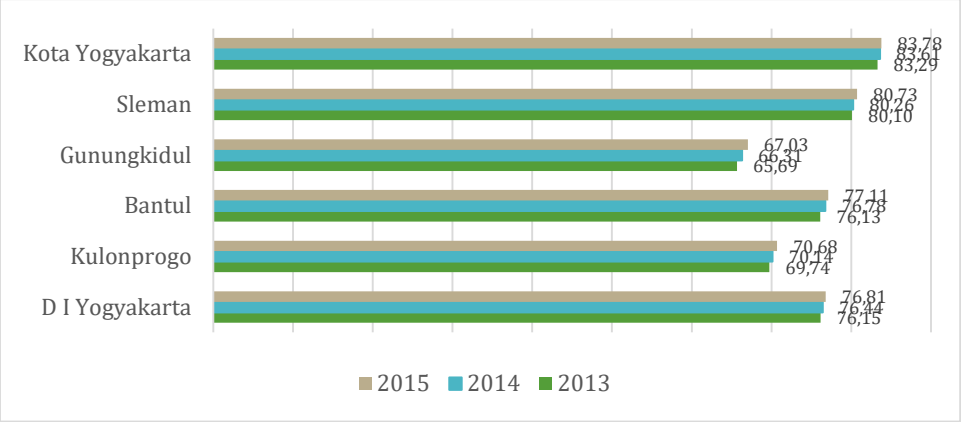

Sumber : BPS, 2016

Gambar III.45 IPM Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2015

3. Pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

IPG atau Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Measure)* merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan

Target IPG tahun 2015 sebesar 71,71% terealisir 72,5%, dengan tingkat capaian 73,35%.Pada tahun 2015 Kabupaten Bantul dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 77,11% dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) sebesar 72,5% adalah termasuk IPM cukup tinggi dan IPG yang cukup tinggi pula. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia berada pada kondisi yang sudah baik yang diikuti pula dengan pemberdayaan perempuan yang baik. Hal ini dapat diartikan bahwa hasil dari pembangunan manusia yang sudah baik sudah dapat dimanfaatkan oleh penduduknya untuk berbuat yang maksimal dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan.

D. Akuntabilitas Anggaran

APBD Kabupaten Bantul pada tahun 2015 untuk anggaran pendapatan sebesar Rp.1.914.059.443.086,67 dan belanja sebesar Rp.2.179.257.337.075,43 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp.265.197.893.988,76 yang ditutup dengan pos pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan tahun lalu (Silpa). Sedangkan realisasi APBD Kabupaten Bantul TA 2015 untuk pendapatan sebesar Rp.1.951.173.970.361,17 realisasi belanja Rp.1.933.302.495.457,00 dan surplus realisasi belanja Rp.113.565.863.886,19 dan terdapat surplus pembiayaan Rp.265.105.309.909,76 sehingga terdapat Silpa Rp.282.976.784.813,93.

Rencana pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (sebelum dilakukan audit BPK RI) sebagai berikut :

Tabel III.26 Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015*

Uraian		Jumlah TA 2015		Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
A	Pendapatan	1.914.059.443.086,67	1.951.173.970.361,17	37.114.527.274,50	101,94
	Pendapatan asli daerah	335.797.050.980,39	390.575.225.729,28	54.778.174.748,89	116,31
	Dana perimbangan	1.054.209.874.000,00	1.041.842.461.074,00	-12.367.412.926,00	98,83
	Lain-lain pendapatan yang sah	524.052.518.106,28	518.756.283.557,89	-5.296.234.548,39	98,99
B	Belanja	2.179.257.337.075,43	1.933.302.495.457,00	-245.954.841.618,43	88,71
	Belanja tidak langsung	1.329.906.983.232,43	1.165.767.588.235,00	-164.139.394.997,43	87,66
	Belanja langsung	849.350.353.843,00	767.534.907.222,00	-81.815.446.621,00	90,37
C	Pembiayaan				
	Penerimaan daerah	301.208.893.988,76	298.601.809.909,76	-2.607.084.079,00	99,13
	Pengeluaran daerah	36.011.000.000,00	33.496.500.000,00	-2.514.500.000,00	93,02
	Surplus (defisit) pembiayaan	265.197.893.988,76	265.105.309.909,76	-92.584.079,00	99,97
	Selisih lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	0	282.976.784.813,93	282.976.784.813,93	

Sumber : DPPKAD, 2016 * : unaudited

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp.2.179.257.337.075,43 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Rencana Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (sebelum dilakukan audit BPK RI) sebagai berikut :

Tabel III.27 Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tak Langsung	1.329.906.983.232,43	61,03
2	Belanja Langsung	849.350.353.843,00	38,97
Jumlah		**2.179.257.337.075,43**	**100,00**

Sumber : DPPKAD, 2016

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.28 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah	13.557.869.920,00	1,60
2	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	6.659.224.270,00	0,78
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	11.350.135.100,00	1,34
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	271.719.431.971,00	31,99
5	Meningkatnya kualitas pendidikan	72.476.584.239,00	8,53
6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan	155.060.331.901,00	18,26
7	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	10.946.034.833,00	1,29
8	Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata	6.431.873.000,00	0,76
9	Menurunnya tingkat pengangguran	17.174.810.346,00	2,02
10	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	37.225.969.272,00	4,38
11	Meningkatnya kesiagaan masyarakat terhadap bencana	2.117.925.040,00	0,25
Jumlah		**604.720.189.892,00**	71,20
Belanja Langsung Pendukung		**244.630.163.951,00**	28,80
Total Belanja Langsung		**849.350.353.843,00**	100,00

Sumber : Bagian Tapem, 2016, data diolah

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp.604.720.189.892,00 atau sebesar 71,20% dari total belanja langsung,

sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.244.630.163.951,00 atau sebesar 28,80% dari total belanja langsung.

Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan besaran anggaran 31,99% dari total belanja langsung. Sasaran lain dengan anggaran yang relative besar adalah sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemerataan Pendapatan, yaitu sebesar 18,26%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Meningkatnya Kesiagaan Masyarakat Terhadap Bencana sebesar 0,25% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 90,37%%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 91,29%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 88,09%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase Gizi Guruk sebesar 100%. Anggaran pada IKU ini efektif mendukung akuntabilitas kinerja. Sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) sebesar 68,59%, atau kurang efektif dalam mendukung akuntabilitas kinerja.

Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemerataan Pendapatan menyerap anggaran paling besar yaitu 99,27% dari target. Anggaran pada sasaran ini efektif mewujudkan akuntabilitas kinerja. Sedangkan sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa serta Lembaga Pemerintah menyerap anggaran terkecil yaitu 76,86% dari target, atau kurang efektif dalam mendukung akuntabilitas kinerja.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel III.29 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	67	70,26	104,87	6.287.353.125	5.433.750.232	86,42
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,2	3,2464	101,45	7.270.516.795	4.986.886.153	68,59
2	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Opini pemeriksaan BPK	WTP	WTP	100	6.659.224.270	5.565.894.040	83,58
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,67	78,31	103,49	11.350.135.100	10.406.813.150	91,69
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi	70	87,5	75	638.017.200	611.814.390	95,89
		Angka Kematian Ibu	7	8,35	80,71	7.831.518.900	7.390.014.701	94,36
		Persentase Gizi Buruk	0,43	0,38	111,63	3.168.435.000	3.168.315.850	100,00
		Usia Harapan Hidup	71,4	73,24	102,58	260.081.460.871	223.984.732.050	86,12
5	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka melek huruf	93	97,51	104,85	24.362.592.600	23.021.584.900	94,50
		Rata-rata lama sekolah	9,2	8,74	95	48.113.991.639	42.802.165.550	88,96
6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,88	5,1	86,73	90.570.824.714	89.840.009.307	99,19
		Indeks Gini	0,2281	0,3177	60,72	64.489.507.187	64.087.328.630	99,38

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
	pemerataan pendapatan							
7	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Tingkat Ketersediaan Energi	140,91	142,88	101,4	4.097.857.500	3.926.779.436	95,83
		Tingkat Ketersediaan Protein	136,21	136,49	100,21	6.848.177.333	6.107.329.264	89,18
8	Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata	Persentase peningkatan jumlah wisatawan	5	8,7	174	6.431.873.000	5.846.424.625	90,90
9	Menurunnya tingkat pengangguran	Angka pengangguran	4,7	4,1	112,77	17.174.810.346	16.636.132.286	96,86
10	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	Persentase jumlah penduduk miskin	12	15,16	73,67	37.225.969.272	36.238.466.746	97,35
11	Meningkatnya kesiagaan masyarakat terhadap bencana	Persentase Desa Tangguh	13,33	17,33	130,01	2.117.925.040	1.980.085.940	93,49
Jumlah						**604.720.189.892**	**552.034.527.250**	**91,29**
Belanja langsung pendukung						**244.630.163.951**	**215.500.379.972**	**88,09**
Total belanja langsung						**849.350.353.843,00**	**767.534.907.222**	**90,37**

Sumber : Bagian Tapem, 2016, data diolah

E. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 9,63%%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 8,71%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 11,91%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU INilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) sebesar 31,41%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase Gizi Buruk sebesar 0,00%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa serta Lembaga Pemerintah efisiensi anggarannya paling besar yaitu 23,14% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemerataan Pendapatan efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0,73% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.30 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2015

No	Indikator Kinerja Utama	Anggaran			Efisiensi Anggaran	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Rp	%
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	6.287.353.125	5.433.750.232	86,42	853.602.893	13,58
2	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	7.270.516.795	4.986.886.153	68,59	2.283.630.642	31,41
3	Opini pemeriksaan BPK	6.659.224.270	5.565.894.040	83,58	1.093.330.230	16,42
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	11.350.135.100	10.406.813.150	91,69	943.321.950	8,31
5	Angka Kematian Bayi	638.017.200	611.814.390	95,89	26.202.810	4,11
6	Angka Kematian Ibu	7.831.518.900	7.390.014.701	94,36	441.504.199	5,64
7	Persentase Gizi Buruk	3.168.435.000	3.168.315.850	100,00	119.150	0,00
8	Usia Harapan Hidup	260.081.460.871	223.984.732.050	86,12	36.096.728.821	13,88
9	Angka melek huruf	24.362.592.600	23.021.584.900	94,50	1.341.007.700	5,50
10	Rata-rata lama sekolah	48.113.991.639	42.802.165.550	88,96	5.311.826.089	11,04
11	Indeks Gini	90.570.824.714	89.840.009.307	99,19	730.815.407	0,81

No	Indikator Kinerja Utama	Anggaran			Efisiensi Anggaran	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Rp	%
12	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	64.489.507.187	64.087.328.630	99,38	402.178.557	0,62
13	Tingkat Ketersediaan Energi	4.097.857.500	3.926.779.436	95,83	171.078.064	4,17
14	Tingkat Ketersediaan Protein	6.848.177.333	6.107.329.264	89,18	740.848.069	10,82
15	Persentase peningkatan jumlah wisatawan	6.431.873.000	5.846.424.625	90,90	585.448.375	9,10
16	Angka pengangguran	17.174.810.346	16.636.132.286	96,86	538.678.060	3,14
17	Persentase jumlah penduduk miskin	37.225.969.272	36.238.466.746	97,35	987.502.526	2,65
18	Persentase Desa Tangguh	2.117.925.040	1.980.085.940	93,49	137.839.100	6,51
Jumlah		**604.720.189.892**	**552.034.527.250**	**91,29**	**52.685.662.642**	**8,71**
Belanja langsung pendukung		**244.630.163.951**	**215.500.379.972**	**88,09**	**29.129.783.979**	**11,91**
Total belanja langsung		**849.350.353.843**	**767.534.907.222**	**90,37**	**81.815.446.621**	**9,63**

Sumber : Bagian Tapem, 2016, data diolah

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2015, disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 11 (sebelas) sasaran, 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar **100,68%** atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi.**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 18 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 13 (tiga belas) IKU atau sebanyak 77,22% kriteria **Sangat Tinggi**, 2 (dua) IKU atau 11,11% kriteria **Tinggi,** 2 (dua) IKU atau 11,11% kriteria **Sedang** dan 1 (satu) IKU atau 5,56% kriteria **Rendah**. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja utama yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 khususnya untuk Tahun Anggaran 2015 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Lampiran I

Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Bantul Tahun 2015

1. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014 oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 28 Mei 2015
2. Pemerintah Kabupaten Bantul, Predikat "BB" atas prestasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 25 Januari 2016
3. Peringkat 8 (delapan) atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2013 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 27 April 2015
4. Sertifikat Akreditasi Laboratorium BLH dari Komite Akreditasi Nasional, 10 Juni 2015
5. Satya Lencana Kalpataru dari Presiden Republik Indonesia, 26 November 2015
6. Sekolah Adiwiyata Nasional Mandiri dari Presiden Republik Indonesia, 5 Juni 2015
7. Sekolah Adiwiyata Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 14 Desember 2015
8. Peringkat II Tingkat Nasional Penghargaan Kelompok Tani Jagung Berprestasi Tahun 2015 dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 15 Oktober 2015
9. Juara III Tingkat Nasional, Penyuluh Kehutanan PNS Lomba Wana Lestari dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Agustus 2015
10. Peringkat II Tingkat Nasional, Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Web Kategori SKPD Lingkup Kabupaten/Kota Tahun 2015, 30 November 2015
11. Juara I Tingkat Nasional, Pemilihan Bidan Praktek Mandiri terbaik dalam pelayanan KB Regional Jawa – Bali dari Kepala BKKBN, 31 Juni 2015
12. Juara I Tingkat Nasional, Lomba Homestay dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 29 Oktober 2015

13. Penghargaan Tertinggi Tingkat Nasional/Swasti Sabha Wistara dari Kementerian Keseharan Republik Indonesia, 25 November 2015
14. Juara I Tingkat Nasional Manggala Karya Bhakti Husada dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 23 November 2015
15. Juara I Tingkat Nasional, Lomba Sekolah Sehat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 14 Agustus 2015
16. Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Nasional dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 7 Agustus 2015
17. Juara I Tingkat Nasional Unit Penanganan Pengelolaan Hasil Perikanan Non Konsumsi Skala Mikro Kategori Ikan Hias dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 11 Desember 2015
18. Juara II Tingkat Nasional, KUB Teladan Penerima Bantuan Kapal Perikanan Diatas 30 GT dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 11 Desember 2015
19. Anugerah E-KKP3K Kategori Percepatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 11 Desember 2015
20. Sertifikasi BS EN ISO 9001 : 2008 dari PT. NQA, 23 April 2015
21. Juara I Tingkat Nasional Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Lahir dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Oktober 2015
22. Peringkat II, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Berprestasi Tingkat Nasional dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, 20 Desember 2015
23. Evaluasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan PRORER 2014 – 2015 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 1 Juli 2014 – 30 Juni 2015
24. Akreditasi Rumah Sakit lulus Paripurna dari Komisi Akreditasi RS (KARS), 14 April 2015
25. Juara I Tingkat Nasional, Cabang Olah Raga Panahan dan Pencak Silat pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, 10 November 2015
26. Juara II Tingkat Nasional, Cabang Olah Raga Atletik Dan Pencak Silat pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, 10 November 2015
27. Juara III Tingkat Nasional, cabang Olahraga Karate, Volley Pasir, Panahan, Pencak Silat pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, 10 November 2015
28. Terbaik I Kategori Kabupaten Sedang Tingkat Nasional, Indonesia *Smart Nation Award* 2015 dari *City Asia Ink*, 20 Oktober 2015

Lampiran II

Struktur Pemerintah Kabupaten Bantul

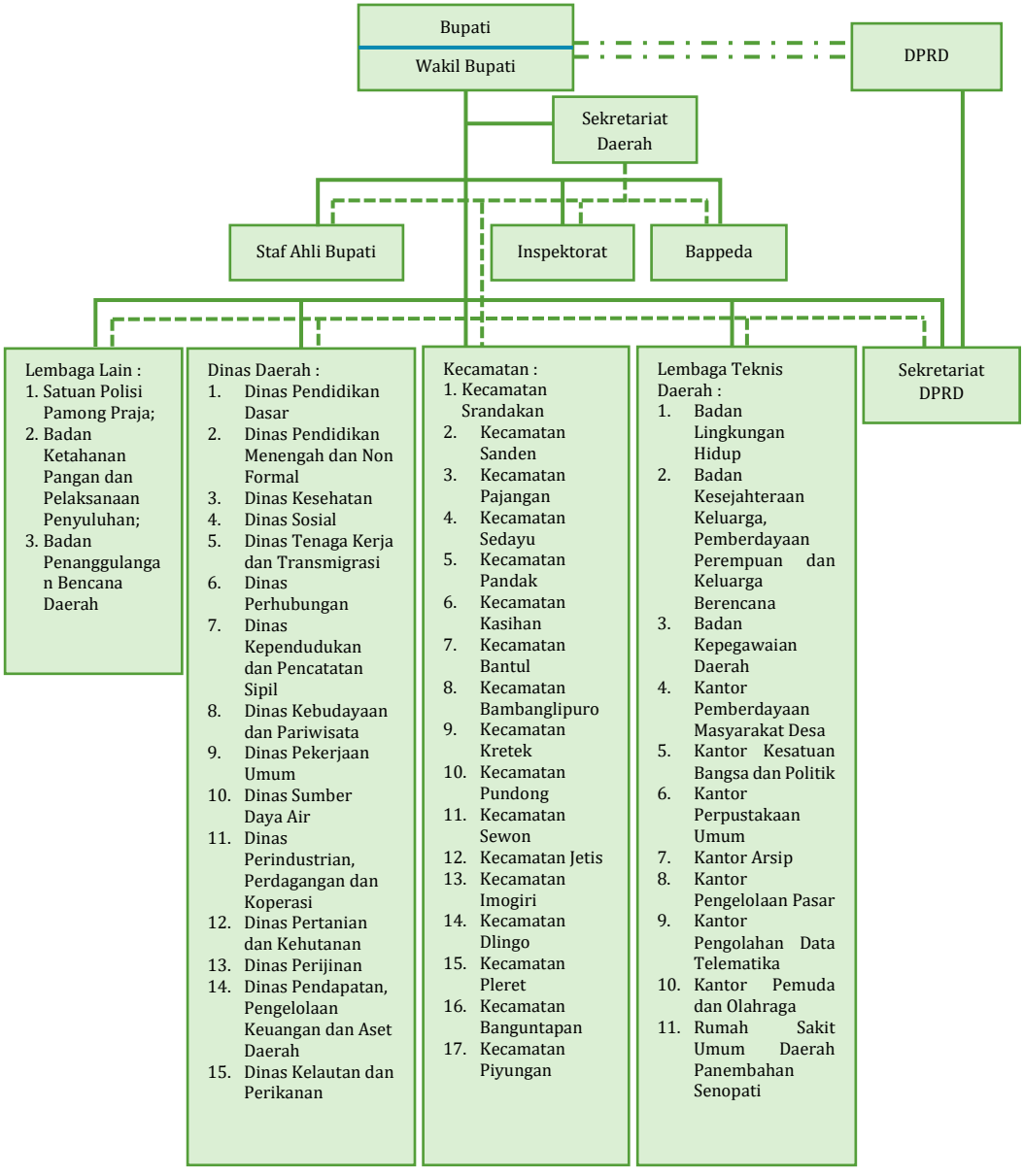

Lampiran III

Nilai Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bantul Tahun 2014 – 2015 (Jutaan Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	PDRB (juta Rp)	2014 (%)	PDRB (juta Rp)	2015**) (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan	2.243.492	15,09	2.412.517	15,44
2	Pertambangan dan Penggalian	108.532	0,73	125.001	0,8
3	Industri Pengolahan	2.267.280	15,25	2.339.079	14,97
4	Pengadaan Listrik dan Gas	13.381	0,09	17.188	0,11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	11.894	0,08	14.063	0,09
6	Konstruksi	1.421.324	9,56	1.578.136	10,1
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	1.238.455	8,33	1.343.759	8,6
8	Transportasi dan Pergudangan	719.583	4,84	693.755	4,44
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.690.424	11,37	1.829.700	11,71
10	Informasi dan Komunikasi	1.113.569	7,49	904.694	5,79
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	407.367	2,74	434.378	2,78
12	*Real Estate*	944.080	6,35	1.042.195	6,67
13	Jasa Perusahaan	71.364	0,48	82.813	0,53
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.063.020	7,15	1.128.133	7,22
15	Jasa Pendidikan	999.090	6,72	1.078.133	6,9
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	261.666	1,76	278.127	1,78
17	Jasa lainnya	292.88 8	1,95	323.440	2,07
PDRB		**14.867.409**	**100**	**15.625.110**	**100**

Sumber : BPS, 2016

**) Angka sangat sementara

Lampiran IV

Target dan Capaian MDGs di Bantul Tahun2011 – 2015

Indikator		Capaian 2010	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Akhir 2015	Penanggung jawab
			2011		2012		2013		2014		2015		skpd
Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan													
Target 1 A : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari 1 US dollar 19 PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015.													
1.1.	Tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional	16,6	10,3	17,28	10,3	16,97	10,3	16,46	10,3	15,8	12	15,89	Dinsos, BKK
1.2.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,74		3		2,78					2,5	2,9	Dinsos, BKK
Target 1 B : Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda													
1.4	Laju PDRB per tenaga kerja	-0,81		7,6		1,51		2,63	2,6	2,63	2,5	9,83	Disnaker trans
1.5	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	66%		66%		68%	60	96,64	63	96,64%	65%	97,43	Disnaker trans
1.7	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	34%		27%		25%		27,57 %	25%	27,57%	25%	26,8%	Disnaker trans
Target 1C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015													
1.8	Prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi												
1.8a	Prevalensi balita gizi buruk	0,58%	3,6	0,52%	3,6	0,44%	0,42%	0,42%	0,45%	0,38%	0,43%	0.38	Dinkes

Indikator		Capaian 2010	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Akhir 2015	Penanggung jawab
			2011		2012		2013		2014		2015		skpd
1.8b	Prevalensi balita gizi kurang	12%		11.31%		9,70%	9,71%		8,50%	8,15%	8,50%	7,87	Dinkes
1.9	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum												
	1400 kkal/kapita/hari					13,90%	14%	10,71 %	13%	10,71%	12%	7,42%	BKP3, Dinkes
	2000 kkal/kapita/hari					66,07%		64,62 %		64,62%		57,05	BKP3, Dinkes
Tujuan 2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua													
Target 2A : Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar													
2.1	Angka Partisipasi Murni di sekolah dasar	91,03		92,3		92,91		93,8	98,65	97,65	98,66	96,06%	Dikdas
2.2.	Proporsi murid di kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar.	99,98%	99.99 %	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	100%	99,99%	100%	100%	100%	Dikdas
2.3	Angka Partisipasi Murni disekolah lanjutan tingkat pertama	91,03%	98,49	91.23%	98,85	92,19%	99.	81,04	99,5.	81,9	92,00 %	93,82	Dikdas
2.4	Angka melek huruf usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki	91,03		91,23		92,23				100%	100%	100%	Dikdas, Dikmenof
Tujuan 3. Mendorong Kesetaran Gender dan Pemberdayaan Perempuan													
Target 3A : Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan dis emua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015													
3.1.	Rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar, lanjutan, dan tinggi, yang diukur melalui angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki.												
	Rasio APM perempuan laki-laki di tingkat SD	119,77	80%	104	81,50%	121,11	83,50%	100	86,50%	100,75	90,25 %	100%	BKK PP KB, Dikdas

Indikator		Capaian 2010	Target 2011	Realisasi 2011	Target 2012	Realisasi 2012	Target 2013	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Target 2015	Akhir 2015	Penanggung jawab skpd
	Rasio APM perempuan laki-laki di tingkat SMP	104,09	64%	104,8	65%	98,55	66%	100	67%	99,6	68%	97,22%	BKK PP KB, Dikdas
	Rasio APM perempuan laki-laki di tingkat SMA	107,9	98,10 %	125,3	98,20%	90	98,25%	100	98,30%	89,9	98,35 %	100,08%	BKK PP KB, Dikmenof
	Rasio APM perempuan laki-laki di tingkat PT	90,156		159,9		140,32		100	100	n.a	100	n.a	BKK PP KB
3.2.	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun, yang diukur melalui angka melek huruf perempuan/laki-laki (indeks melek huruf gender).	100	89,94 %	100,9	90,34%	101,52	90,74%	100	91,14%	100%	91,14 %	100%	BKK PP KB
3.3.	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian.	38,05		36,69		36,3		36,7	36,9	43,68	37,1	49,45%	Nakertrans
3.4.	Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan	15,56		15,56		15,56		15,56	15,56	6,67	20	6,67	
	DIY												
	Kabupaten/Kota												
Tujuan 4. Menurunkan Anga Kematian Anak													
Target 4A : Menurunkan angka kematian balita (AKBA) sebesar dua per tiganya, antara 1990 dan 2015													
4.1.	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	1,7		1,6		1,9		1,9	1,9	0,74	1,9	0,318	Dinkes
4.2.	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	9,8	23	8,5	23	8,6	23	9,39	7,5	8,75	7	8,35	Dinkes
4.3	Persentase anak dibawah satu tahun yang di imunisasi campak	97,3		98,27		94,83		95,3	95	96,06	95	95	Dinkes
Tujuan 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu													
Target 5.A. Menurunkan angka Kematian Ibu hingga tiga perempat dalam kurun waktu 1990-2015													
5.1	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran Hidup	82,07	102	112,6	102	52,16	102	96,83	75	104,7	70	87,5	Dinkes

Indikator		Capaian 2010	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Akhir 2015	Penanggung jawab
			2011		2012		2013		2014		2015		skpd
5.2	Propirsi Kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	99,5	95	99,9	95	99,9	95	99,96	95	99,98	95	99,96	Dinkes
Target 5.B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015													
5.3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah umur 15-49 semua cara dan cara modern	79%		79%		80%		81	76,50%	79,87	76,50 %	80,55%	BKK, Dinkes
5.4	Angka kelahiran remaja (perempuan 15-19 tahun) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun							4,18	4	0,53	4	9,31	Dinkes
5.5	Cakupan pelayanan antenatal (sedikitnya 1 kali kunjungan dan empat kali kunjungan)												
	1 kali kunjungan	100%		100%		100%		100%	100%	100%	100%	100	Dinkes
	4 kali kunjungan	90,20%		89.66%		91,80%		95%	95%	92,02%	95%	90,96	Dinkes
5.6	*Unmet Need* (Kebbutuhan keluarga berencana/KB Yang tidak terpenuhi)	8,69%	5	7,74%		6,62%	5	6,25%	6,00%	6,17%	5,00%	5,72%	BKK PP KB
Tujuan 6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya													
Tujuan 6.A. Mengendalikan Penyebaran dan mulai menurunkan Jumlah Kasus Baru HIV/AIDS hingaa Tahun 2015													
6.1	Prevalensi HIV/AIDS (Persen dari Total Populasi)	0,007% (36 Kasus)		0,005% (54 Kasus)		0,01% (54 Kasus)		<0,05 % (473 Kasus)	<0,5%	0,05	<0,5%	0,062	Dinkes
6.2	Penggunaan Kondom pda Hubungan Seks beresiko tinggi	20%		40%		50%		80%	90%	100%	90%	100	Dinkes
6.3	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memeiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	30%		40%		50%		80%	90%	100%	90%	100	Dinkes

Indikator		Capaian 2010	Target 2011	Realisasi 2011	Target 2012	Realisasi 2012	Target 2013	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Target 2015	Akhir 2015	Penanggung jawab skpd
Target 6.B. Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010													
6.5	Proporsi penduduk terinveksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan an retroviral	100%		100%		100%		100%	100%	100%	100%	100	Dinkes
Target 6.C. Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkaan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015													
6.6	Angka kejadian malaria dan angka kematiannya	0,02		0,005		0,07		0,0005	0	0,0006	0	0	Dinkes
6.7	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	Bantul	Bukan	Termasuk	Daerah	Endemis	Malaria					tdk ada program	Dinkes
6.9a	Angka kejadian Turbekulosis (semua kasus/100.000 penduduk/tahun)	43 (196 Kasus)		25 (228 Kasus)		23 (209 Kasus)		25 (314 Kasus)	25	46,35	24	33,21	Dinkes
6.9b	Tingkat prevalensi Turbekulosis (per 100.000 penduduk)	43 (196 kasus)		25(228 kasus)		23 (209 kasus)		25 (314 Kasus)	25	23,6	24	26,53	Dinkes
6.9c	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	4,08 (8 Kasus)		10,53% (24)		5,74 (12 Kasus)		7,17% (17 Kasus)	7%	1,20%	7%	7,39	Dinkes
6.10	Proporsi jumlah kasus Turbekulosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS												
6.10 a	Proporsi jumlah kasus Turbekulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	50,62		44,23		51,05		52,68 %	70	100%	70	33,21	Dinkes
6.10 b	Proporsi kasus Turbekulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	84,87%		90,35%		86,40%		79,75 %	88	87,20%	88	78,46	Dinkes
Tujuan 7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup													
Target 7A. Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebjakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang													

Indikator		Capaian 2010	Target 2011	Realisasi 2011	Target 2012	Realisasi 2012	Target 2013	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Target 2015	Akhir 2015	Penanggung jawab skpd
7.1	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan	62%		62%		63%		65%	65%	65%	65%	65%	Dipertahut, Bappeda
7.2	Jumlah emisi karbon dioksida (CO2)											n/a	
7.3	Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO)											n/a	
7.4	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman											n/a	
Target 7B. Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010													
7.5	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan											n/a	
7.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial											n/a	
Target 7C. Menurunkan hingga setenggahnya proporsi rumah tangga tanpa kases berkelanjutan terhadap air minum yang layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015													
7.8	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan												
7.8a	Perkotaan	83		82.5%		88,86		92,42	95	97,6	95	98	Dinkes, DPU, Bappeda
7.8b	Perdesaan	83		82.5%		88,86		92,42	95	97,6	95	98	Dinkes, DPU, Bappeda

Indikator		Capaian 2010	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Akhir 2015	Penanggung jawab
			2011		2012		2013		2014		2015		skpd
7.9	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi yang layak perkotaan dan perdesaan												
7.9a	Perkotaan	67,80%		80,8		65,91		65,9	80	82,11	85	93,92	Dinkes, DPU, Bappeda
7.9b	Perdesaan	67,80%		80,8		65,91		65,9	80	82,11	85	93,92	Dinkes, DPU, Bappeda
Target 7D. Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020													
7.10	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan			0,15		0,14		1,58%	0,13	1,26%	0,13	0,05%	DPU, Bappeda

Sumber : Bappeda, 2016